

*LAPORAN PENELITIAN*

**Tema : Pluralisme dan Keberagaman**  
**Subtema : Negara, Agama dan Masyarakat**

**KONFLIK DAN GERAKAN  
MODERASI BERAGAMA  
DI INDONESIA**



**PENELITIAN TERAPAN KAJIAN  
STRATEGIS NASIONAL**

**Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag**  
**Siti Ismahani, M.Hum**  
**Muhammad Jailani, MA**

**M E D A N**

**2 0 2 2**

## LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian ini berjudul:

### **“Konflik dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia”**

Bidang Penelitian : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Kategori Penelitian : Penelitian Kelompok

Unit kerja : Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Waktu Penelitian : 2022

Lokasi Penelitian : Kota Medan

Dana Penelitian : Rp. 100.000.000,-

Mengetahui Medan, 19 Oktober 2022

Ketua Lembaga Penelitian Peneliti

Dan Pengabdian Masyarakat  
(LP2M)

Dr. Hasan Sazali, M.Ag  
NIP. 197602222007011018

Prof.DR. Hasan Bakti Nasution, MA  
NIP. 196208141992031003

## SURAT PERNYATAAN

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Prof.DR. Hasan Bakti Nasution, MA

NIP : 196208141992031003

NIDN : 2014086203

Unit Kerja : FUSI UIN SU Medan

Jabatan : Ketua Tim

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bahwa saya adalah benar-benar dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan dan kemudian berpindah tugas ke Fakultas Ilmu Sosial UIN SU dan tidak sedang tugas belajar.
2. Bahwa penelitian dengan judul : **“Konflik dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia”** adalah benar-benar orisinal, bukan plagiasi serta belum/atau tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam,*  
Medan, 19 Oktober 2022  
Ketua Tim,

Prof.DR. Hasan Bakti Nasution, MA)

## SURAT PERNYATAAN

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Siti Ismahani, M.Hum  
NIP : 196905031999032003  
NIDN : 2003056903  
Unit Kerja : FUSI UIN SU Medan  
Jabatan : Anggota Tim

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bahwa saya adalah benar-benar dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan dan kemudian berpindah tugas ke Fakultas Ilmu Sosial UIN SU dan tidak sedang tugas belajar.
2. Bahwa penelitian dengan judul : **“Konflik dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia”** adalah benar-benar orisinal, bukan plagiasi serta belum/atau tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam,*  
Medan, 19 Oktober 2022  
Anggota Tim,

(Siti Ismahani, M.Hum)

## SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhammad Jailani, S.Sos, MA  
NIB : 1100000105  
NIDN : 2001017208  
Unit Kerja : FIS UIN SU Medan  
Jabatan : Anggota Tim

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Bahwa saya adalah benar-benar dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan dan kemudian berpindah tugas ke Fakultas Ilmu Sosial UIN SU dan tidak sedang tugas belajar.
2. Bahwa penelitian dengan judul : **“Konflik dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia”** adalah benar-benar orisinal, bukan plagiasi serta belum/atau tidak sedang didanai oleh DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ataupun pihak lain.

Demikianlah surat pernyataan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam,*  
Medan, 19 Oktober 2022  
Anggota Tim,

(Muhammad Jailani, S.Sos, MA)

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim. Alhamdulillahhirabbil ‘Alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak rektor UIN-SU Medan yang dalam hal ini difungsikan melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk ambil bagian dalam kegiatan penelitian BOPTN melalui UIN SU pada tahun 2022.

Penelitian tentang topik “Konflik dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia” merupakan topik penelitian yang penting dan sangat menarik. Dikatakan penting karena penelitian ini dapat dijadikan rumusan membangun strategi nasional dalam mengembangkan moderasi beragama benar-benar menjadi satu gerakan sosial daripada hanya sebagai program atau project. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pembangunan kerukunan beragama ke depannya.

Peneliti mengharapkan laporan penelitian ini dapat menjadi acuan praktis dan empiris dalam pengembangan penelitian-penelitian moderasi beragama. Begitu juga, kami merancang adanya kerja lanjutan dari data temuan penelitian ini sehingga dapat memberikan kemanfaatan bagi UIN SU dan Kementerian Agama Republik Indonesia, pemerintah provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara dan juga publik pada umumnya.

Medan, 19 Oktober 2022

Peneliti

Judul Penelitian : “Konflik dan Gerakan Moderasi Beragama Di Indonesia”

Kelompok Penelitian : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

### **Tim Peneliti**

#### **1. Ketua**

Nama : Prof.DR. Hasan Bakti Nasution, MA  
NIP/NIDN : 196208141992031003/2014086203  
Tempat/Tgl.Lhr. : Pasir Putih/14-08-1962  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya/IV-d  
Unit Kerja : Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
Alamat : Komplek Albarakah Jln. Meteorologi Raya  
Sampali Deli Serdang Sumatera Utara  
No.HP :08126067594

#### **2.Anggota Peneliti**

Nama Peneliti : Muhammad Jailani, S.Sos, MA  
NIB : 1100000105  
NIDN : 2001017208  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Alamat Peneliti : Komp. Griya Mandiri C.29 Deli Tua  
Namorambe  
Nomor Telpon : 081370212644

#### **3. Anggota Tim**

Nama : Siti Ismahani, M.Hum  
NIP/NIDN : 196905031999032003/2003056903  
Unit Kerja : FUSI, UIN-SU  
Tempat/tgl lahir : Medan/03-05-1969  
Alamat : Jl. M. Yakub Lubis No.46B/ 24 Bandar  
Khalifah Deli Serdang Sumatera Utara  
NO.HP/Email : [081397323456/sitiismahani@uinsu.ac.id](mailto:081397323456/sitiismahani@uinsu.ac.id)

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Surat Pernyataan	ii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstraksi	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	7
D. Signifikansi dan Kontribusi Penelitian	8
E. Biaya dan Sumber Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	9
G. Jadwal pelaksanaan penelitian	12

### BAB II KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori	14
1. Teori Konflik	14
2. Perbandingan Politik	16
3. Teori Konstruksi Sosial	18
4. Teori gerakan sosial dan gerakan politik	27
5. Teori Elit Politik	30
6. Komunitas Agama	36
7. Organisasi Islam Washatiyah	41
8. Kebijakan publik	48
B. Kerangka Konsep	49
C. Penelitian Pendahuluan	50

### BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode dan pendekatan penelitian	55
2. Lokasi Penelitian	56
3. Subjek Penelitian/ Informan Kunci	56
4. Teknik Pengumpulan data	57
5. Pelaksanaan Penelitian	58

6. Analisa Data	60
7. Validasi data	62
<b>BAB IV DESKRIPSI UMAT BERAGAMA SUMATERA UTARA DAN SULAWESI UTARA</b>	
A. Geografi dan demografi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara	64
B. Situasi Sosiologis umat beragama di Sumut dan Sulut	72
<b>BAB V PERBANDINGAN KONFLIK DI SUMATERA UTARA DAN SULAWESI UTARA</b>	
A. Peta konflik di Sumut dan Sulut	80
B. Pengelolaan konflik	
<b>BAB VI PERBANDINGAN GERAKAN MODERASI BERAGAMA DI SUMUT DAN SULUT</b>	
A. Perbandingan dan persamaan Pembentukan kolektif Memory	102
B. Perbandingan dan persamaan framing kesadaran Bersama	106
C. Perbandingan analisa aktor gerakan moderasi beragama	109
D. Perbandingan aksi bersama Gerakan moderasi beragama	110
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	119
Lampiran Photo-photo	122
Lampiran Guidline Interview	124

## ABSTRACTION

This research describes the conflict and religious moderation movement map in two provinces, North Sumatra and North Sulawesi. The background of this study is that the patterns and factors that trigger conflict in the two provinces have a population with a majority of different religions. Likewise, it is not known how religious moderation in the two districts was popularized as a social movement or only as a top-down program or project. The study location is in Medan city, the capital city of North Sumatra, and Manado city as the capital city of North Sulawesi. The research subject is the government representative, representative of religious scholars, leaders of religious leader associations, interfaith practitioners, and lecturer. This research uses a qualitative method by using a comparative analysis approach. The theories of conflict, social construction, and social movement lead the conceptual framework. This study finds that Either North Sumatra or North Sulawesi have disputes involving inter-religious communities, where the root of the conflict is not always religion. Still, religion is used as a tool for framing society. The conflict resolution between the two provinces uses top-down key and minority adaptation. There are differences in the historical understanding of the dynamics of inter-religious relations in the two provinces. North Sumatra is forming stages of the religious moderation movement based on theological knowledge memory, while North Sulawesi uses a powerful cultural approach. The religious moderation movement in the two provinces has not yet fully become a pattern of social movement.

**KeyWords:** Conflict, Moderasi Beragama, Gerakan Moderasi Beragama,

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Indonesia yang pada sensus tahun 2010 memiliki 237.641.326 jiwa penduduk merupakan negara kepulauan yang warganegaranya tidak saja memeluk agama-agama besar di dunia; Islam, Katolik, protestan, Hindu, Budha dan Konghucu namun juga agama lokal dan aliran kepercayaan. Diketahui bahwa penganut agama Islam di Indonesia pada sensus tahun 2010 mencapai 207.176.162 jiwa. Selanjutnya ada 16.528.513 penganut Kristen Protestan, 6.907.873 penganut Katolik, 4.012.116 jiwa penganut agama Hindu, 1.703.254 penganut agama Budha, 117.091 penganut agama Konghucu dan 299.617 penganut kepercayaan. Ada juga 896.700 jiwa penduduk yang tidak ingin diketahui agama yang dianutnya<sup>1</sup>Selain penganut agama yang berbeda-beda penduduknya juga berlatar belakang suku yang berbeda. Tercatat pada sensus tahun 2010 di Indonesia ada 1.340 suku bangsa yang mendiami lebih dari 5000 pulau dari Sabang sampai Meurauke dari 13.667 pulau yang ada.

Sebagai suatu nilai yang menjadi anutan masyarakat, agama ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi ia menjadi alat perekat antar sesama manusia, tetapi di sisi lain, agama juga bisa menjadi sumber

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistik Politik 2017*, Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik, hlm.156.

konflik. Agama selalu ditempatkan sebagai satu sistem standard nilai dalam suatu sistem tindakan yang mengarahkan dan menentukan sikap dan tindakan umat beragama.<sup>2</sup> Memahami agama sebagai suatu sistem kepercayaan, menuntut untuk bersikap toleran kepada pemeluk agama lain. Akan tetapi, bila seseorang hanya memahami agama secara formal maka ia akan memandang bahwa hanya agamanya saja yang mempunyai klaim kebenaran tunggal dan paling baik. Sementara itu agama lain dipandang telah mengalami reduksionisme (pengurangan), karena itu tidak benar dan kurang sempurna. Sikap ini memunculkan hegemoni agama dan mengecilkan agama lain. Dan umumnya sikap pemahaman formal inilah yang sering memunculkan pertentangan antar umat beragama.

Manusia atau masyarakat dituntut berhubungan antar umat dalam sikap yang toleran dan berpikir positif. Proses berinteraksi dan bermasyarakat dikatakan Charles H. Cooley sebagai proses sosialisasi. Interaksi antar manusia tersebut akan menghasilkan *self concept* atau konsep diri. Proses pembentukan konsep diri ini disebut sebagai *looking-glass self* yang terdiri dari tiga tahapan; hipotesa diri dari pandangan orang lain – hipotesa pandangan orang lain pada diri berdasarkan pengalaman – pembentukan konsep diri. Seorang Pemuda yang melihat dirinya positif – mendapat perlakuan positif dan akan membentuk pandangannya atas pandangan orang lain terhadap diri – membentuk konsep diri pemuda yang positif

Realitasnya, situasi konflik antar umat beragama di Indonesia mengalami pasang surut. Di Tanjung Balai, provinsi Sumatera Utara

---

<sup>2</sup>Zainuddin Daulay e.d, *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Depag, 2003), hlm. 61

misalnya, telah terjadi konflik yang bernuansa SARA khususnya agama dan etnisitas pada tahun 2016. Kasus ini dikategorikan sebagai berlatar agama karena dipicu oleh keberadaan rumah ibadah, yang kemudian klimaksnya adalah penolakan suara azan dengan pengeras suara di masjid. Terlepas dari apa hasilnya, kasus ini berujung pada konflik kekerasan dan diproses penyelesaian melalui Pengadilan, baik di tingkat pengadilan negeri maupun kasasi. Konflik Tanjung Balai, merupakan konflik yang tidak serta merta muncul namun telah bergulir sejak tahun 1975, dimulai dari konflik antara buruh nelayan dengan nelayan lain yang berasal dari Aceh, yang sebenarnya menjadi pendukung bagi pemilik kapal ikan yang sebagian besar beretnis Tionghoa. Dasar konflik pada saat itu adalah kecemburuan pendapatan ekonomi yang dikaitkan dengan diskriminasi etnis. Konflik kemudian dapat diredam tidak muncul kepermukaan, yang terpecah menjadi konflik kecil. Pada tahun 2010 muncul lagi konflik permukaan di mana masyarakat Tanjung Balai yang mayoritas beragama Islam keberatan dengan keberadaan patung Budha di Mihara Theravada. Konflik sentimen etnis berkait dengan agama itupun pecah kembali menjadi konflik kekerasan pada tahun 2016 dengan pembakaran beberapa vihara yang ada disekitar Tanjung Balai. Belajar dari kasus tersebut terlihat dinamika konflik di Tanjung Balai yang menyatu antara kecemburuan kesenjangan ekonomi, perasaan ketidakadilan dan sentimen agama.

Kasus-kasus tersebut ternyata juga terjadi di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Di Kalimantan Barat, pada tahun 1999 terjadi konflik antara masyarakat Dayak dan Melayu dengan masyarakat pendatang yang bersuku Madura menyebabkan lebih

dari 1000 jiwa meninggal dan 30.000 jiwa mengungsi. Konflik ini disebabkan karena kesalahpahaman dan stereotipe yang dibangun antar suku tempatan dan suku pendatang<sup>3</sup>

Di Maluku, konflik yang dipicu akibat kesalahpahaman yang menyebabkan Idul fitri berdarah pada Januari 1999, yang kemudian diikuti konflik akibat ketidak puasaan hasil pilkada pada periode Juni 1999, hingga berhadapan-hadapannya laskar Jihad (Islam) dengan laskar Kristus (Kristen) pada April – Mei 2000 merupakan konflik antar agama yang menimbulkan ribuan korban jiwa meninggal.<sup>4</sup>

Sementara konflik Poso pada tahun 2001 disebabkan oleh pemekaran wilayah dan pemilihan kepala daerah yang terjadi “pertarungan” antara umat Kristen dan Islam. Akar konflik pada dasarnya adalah politik kekuasaan namun dibungkus dengan agama.<sup>5</sup> Situasi dinamika konflik di empat wilayah Indonesia ini menunjukkan bahwa dinamika konflik sangat dipengaruhi oleh identitas para pihak berkonflik baik berbasis agama, suku maupun ekonomi dan orientasi kekuasaan.

Namun demikian berbagai kasus konflik hubungan antar umat beragama tersebut dapat dilokalisir dan dikendalikan untuk kemudian diselesaikan sehingga tidak sampai merusak stabilitas Indonesia, atau merusak stabilitas yang lebih masif dengan terjadinya eksodus besar-besaran di seluruh Indonesia. Namun tentunya bila konflik antar umat beragama ini dibiarkan atau bahkan

---

<sup>3</sup> [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)

<sup>4</sup> Syafuan Rozi, *Kekerasan Komunal, Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42.

didorong oleh pemerintah akan menjadi bencana kemanusiaan seperti yang mulai terjadi di negara lain, Myanmar di negara bagian Rakhine dan menimpa masyarakat Rohingya. Pola eksodus ini sempat terjadi pada masyarakat Madura ketika konflik di Kalimantan Barat tahun 1999 maupun konflik Aceh pada tahun 1999-2000.

Konflik disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain faktor identitas yang terancam, pemenuhan kebutuhan manusia, maupun kesalahpahaman antar budaya, ketidakpercayaan dan permusuhan<sup>6</sup>. Konflik di Tanjung Balai misalnya disebabkan keterancaman satu identitas budaya dan agama yang memunculkan ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok. Bila dilihat keterancaman identitas satu kelompok dari kelompok lain, maka heterogenitas suatu masyarakat menjadi potensi terjadinya konflik. Penyelesaian konflik tentu didukung oleh aneka ragam faktor, seperti kebijakan penguasa, kearifan budaya masyarakat, kualitas relasi antar umat beragama dan sebagainya. Fakta ini tentu menarik untuk dikaji sehingga diperoleh informasi yang utuh dan komprehensif untuk wilayah Indonesia lainnya.

Pada sisi yang sama pluralitas agama adalah suatu keniscayaan di seluruh dunia termasuk di Indonesia karena system kepercayaan setiap manusia atau masyarakat dapat berbeda-beda. Karena itu semua agama mengajarkan tentang penghargaan pada umat manusia terlepas dari latar belakang agama dan suku bangsanya. Terkait dengan Islam sendiri dikenal sebagai agama

---

<sup>6</sup>Simon Fisher and Friends, *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta, British Council, 2000) hlm. 8 - 9

wasatiyah (moderat). Salah satu landasannya adalah Q.S. Albaqarah/2: 143, yang artinya:

*“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia” (Q.S. Albaqarah/2: 143).*

Ayat ini memerintahkan Umat Islam menjadi umat yang tengah, adil, terbaik dan seimbang, Namun demikian interpretasi atau tafsir dalam Alquran dan hadist dapat menyebabkan berbeda pandangan dalam pelbagai konteks, sebut saja seperti jihad, ukhuwah bahkan amar makruf nahi munkar. Perbedaan pandangan ini kemudian dipraktikkan dalam kehidupan beragama, yang bisa membawa kerukunan, namun terkadang menjadi penyebab intoleransi. Peneliti meyakini bahwa pada agama di luar Islam; Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu juga memiliki akar kedamaian dan moderasi.

Untuk itu peneliti melihat pentingnya memahami dan mendeskripsikan bagaimana peta konflik antara umat beragama di Indonesia dan gerakan moderasi beragama, khususnya di dua

propinsi yang merepresentasikan dominasi agama-agama tertentu; yakni Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Diketahui di propinsi-propinsi tersebut belum begitu banyak muncul konflik antar agama, namun potensi konflik sangat besar bila tidak dikelola dengan baik. Menjadi menarik untuk melihat bagaimana peta sosial masing-masing agama berkembang, apa faktor konflik dan perekat antar umat beragama tersebut, serta bagaimana gerakan moderasi beragama di provinsi masing-masing.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian di atas, maka masalah-masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana peta geografis, demografis dan sosiologis umat beragama di Indonesia khususnya propinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Utara?
2. Bagaimana perbandingan faktor konflik dan pengelolaannya terkait konflik antar umat beragama di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara ?
3. Bagaimana gerakan moderasi beragama di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara?

## **C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini dapat dikelompokkan kepada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ialah untuk mendeskripsikan secara mendalam dengan pendekatan analisa perbandingan terkait konflik dangerakan moderasi beragama di Indonesia.

Sedangkan tujuan khususnya ialah:

1. Untuk mengetahui peta geografis, demografis sosiologis umat beragama di Indonesia khususnya propinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.
2. Untuk mendeksripsikan secara mendalam perbandingan faktor konflik antar umat beragama dan pengelolaannya di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.
3. Untuk mengeksplorasi gerakan moderasi beragama di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara khususnya pembentukan memori bersama, kesadaran bersama, tujuan bersama dan gerakan bersama moderasi beragama.

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai informasi baru tentang situasi demografis, sosiologis dan situasi konflik antar umat beragama di Indonesia serta bagaimana gerakan moderasi beragama khususnya di dua provinsi. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam perumusan kebijakan dan tata kelola moderasi beragama di dua provinsi khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

#### **D. SIGNIFIKANSI DAN KONTRIBUSI PENELITIAN**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan keilmuan pemetaan perkembangan masyarakat dan keberagaman dalam perspektif Geografis, demografi dan sosiologi yang akan dipergunakan dosen dan mahasiswa Ushuluddin khususnya Pemikiran Politik Islam. Karena dalam penelitian ini juga akan mengurai implementasi Islam wasathiyah dalam situasi

demografi dan sosiologi yg berbeda. Dengan pula penelitian ini membantu dalam membangun kebijakan perdamaian khususnya pencegahan dan penyelesaian konflik-konflik berbasis keagamaan dan atau etnisitas. Penelitian ini juga sangat signifikan menjadi peta nasional perkembangan komunikasi antar agama dan budaya yang dipengaruhi situasi geografi dan demografi masyarakatnya. Pada sisi yang sama, penelitian ini juga akan memberikan kontribusi besar bagaimana gerakan moderasi beragama di dua provinsi menjadi model untuk direplikasi atau menjadi pembelajaran bagi provinsi lainnya di Indonesia.

#### **E. BIAYA DAN SUMBER BIAYA PENELITIAN**

Penelitian ini mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000,000.00,- (seratus juta rupiah), yang bersumber dari Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2022/2023, melalui Direktorat Perguruan Tinggi Islam (Diktis). Adapun Rencana Anggaran Belanja penelitian sebagaimana terlampir

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika laporan penelitian ini adalah:

**Kata Pengantar**

**Daftar isi**

**Surat Pernyataan Keaslian**

**Bab I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang masalah

- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan manfaat penelitian
- D. Signifikansi dan Kontribusi Penelitian
- E. Biaya dan sumber biaya penelitian
- F. Sistematika penulisan
- G. Jadwal Pelaksanaan penelitian
- H. Curriculum vitae peneliti

## **Bab II :TEORI HUBUNGAN ANTAR AGAMA; KONFLIK, KEBIJAKAN DAN OTORITAS**

- a. Teori Konflik Lewis Coser dan Ibn Khaldun,
- b. Teori Gerakan Sosial Snow and McAdam
- c. Pluralisme Agama Harold Coward,
- d. Premis Samuel P Huntington, terkait benturan antar peradaban,
- e. Teori Perdamaian Jhon Galtung,
- f. Teori Moderasi Beragama

## **Bab III: METODE PENELITIAN**

- a. Metode dan Pendekatan Penelitian
- b. Lokasi Penelitian.
- c. Subjek Penelitian/Informan Kunci
- d. Teknik Pengumpulan Data
- e. Pelaksanaan Penelitian
- f. Analisis data
- g. Validasi data

**Bab IV : DESKRIPSI UMAT BERAGAMA DI SUMATERA  
UTARA DAN SULAWESI UTARA**

- a. Demografis
- b. Etnisitas
- c. Geografis
- d. Konstruksi Budaya
- e. Kearifan Lokal

**Bab V : PERBANDINGAN KONFLIK DI SUMUT, DAN  
SULAWESI UTARA**

- a. Peta Konflik di Sumut dan Sulut
- b. Pengelolaan Konflik

**Bab VI:PERBANDINGAN GERAKAN MODERASI  
BERAGAMA DI SUMUT, DAN SULAWESI UTARA**

- a. Perbandingan dan persamaan framing pengalaman beragama
- b. Perbandingan dan persamaan framing kesadaran beragama
- c. Perbandingan analisa aktor gerakan moderasi beragama
- d. Perbandingan aksi bersama mempromosikan moderasi beragama

**Bab VII : PENUTUP**

- a. Kesimpulan
- b. Rekomendasi
- c. Executive Summary
- d. Daftar Lampiran

## Daftar Bacaan

## Lampiran-lampiran

### G. JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun jadwal kegiatan penelitian ialah sebagai berikut:

No	Bulan/Waktu Kegiatan	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Penyusunan proposal	X						
2	Seminar penyempurnaan proposal		X					
3	Penyusunan Instrumen penelitian		X					
3	Pengumpulan data		X	X	X	X		
4	Analisa data			X	X	X		
5	Penyusunan laporan penelitian					X	X	
6	Seminar hasil penelitian						X	

7	Revisi laporan penelitian						X	X
8	Penggandaan laporan penelitian, pencetakan							X

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. KERANGKA TEORI.**

Manusia diciptakan Tuhan dengan latar belakang dan potensi yang berbeda, sehingga kemudian memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam teori Antropologi dikenal apa yang disebut dengan “binary position”, suatu pandangan bahwa memang dalam hidup ini selalu saja terjadi dua sisi yang berbeda. Ada siang ada malam, ada kebaikan ada kejahatan, dan seterusnya. Terjadinya konflik antar masyarakat tidak terlepas dari watak manusia yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda antar umat beragama.

Haroldd Cowarld, dalam kajiannya pada buku *Pluralisme Agama; Tantangan Bagi Agama-Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1992 menyatakan bahwa dunia selalu memiliki pluralisme agama. Dan diperkuat oleh Hans dan Karl Josep Kanschel, dalam bukunya *Etik Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999 menyebutkan bahwa Hans Kung mengungkapkan bahwa tidak ada lagi usaha dari suatu agama untuk saling menyingkirkan agama-agama lain dengan strategi misi yang agresif, dan mewujudkan kehidupan yang saling berdampingan.

#### **1. Teori Konflik**

Dalam konseptualisasi Konflik didasari pada perbedaan kepentingan, tujuan dan kebutuhan antara dua kelompok atau lebih. Secara sederhana konflik dimengerti sebagai pertentangan, persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosial antara dua atau lebih pihak yang bertentangan. Pada konteks keIndonesiaan, masyarakat cenderung rentan terjadi konflik karena 1) tingginya tingkat segregasi sosial berbasis pada identitas keagamaan, etnis dan golongan; 2) Identitas kolektif menjadi mekanisme mobilisasi kekerasan 3) Kelembagaan kelola konflik adat yang telah mengalami pelemahan akibat modernisasi politik. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa dinamika konflik ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial berbasis pada identitas, golongan, etnis dan tribal. Berbagai kelompok sosial itu melakukan berbagai gerakan untuk memenangi dan menguasai, dan mengatur. Konflik dapat didasari pada kepentingan yang bermacam-macam, namun manusia kemudian menstrukturasi kelompoknya dalam memenangi pertentangan kebutuhan dan tujuannya.

Gambaran di atas menjadi acuan dalam melihat terjadinya konflik di Indonesia. Oleh karena itu, sesungguhnya terjadinya konflik adalah *raison d'eter*, konsekuensi logis yang tidak bisa ditepis dari perbedaan latar belakang, potensi, dan kepentingan tersebut. Namun di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*), seperti kata Aristoteles, sehingga naluri manusia adalah hidup berkelompok. Hal ini juga menjadi karakter dasarnya sehingga ia tidak bisa hidup sendiri. Dengan demikian dalam diri manusia terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan juga faktor-faktor yang menyebabkan harmony. Apakah kemudian yang

terjadi, apakah konflik atau harmoni sangat ditentukan oleh faktor mana yang paling dominan.

Dalam perspektif otoritas Afif Muhammad menyatakan para pemimpin agama cenderung menginginkan anggota kelompoknya memiliki visi dan persepsi yang sama dengan membuat batasan-batasan untuk memastikan keseragaman. Dengan demikian anggota kelompok memiliki logika sendiri, yang seiring dengan pemimpinnya, dalam menginterpretasikan ajaran atau nilai agamanya. Max Weber membagi tiga jenis otoritas atau dominasi yakni 1) Otoritas hukum rasional. Otoritas ini yang dimaksud adalah legitimitasi hukum positif yang ditetapkan oleh negara atau yang memiliki otoritas, sering disebut undang-undang atau peraturan, 2) Otoritas Tradisional, yakni otoritas yang sudah biasa dan struktur sosial yang sudah lama ada, dan, 3) Otoritas kharismatik yakni otoritas karena kharisma individu atau pemimpin yang tidak harus pemimpin formal.

## **2. Politik Perbandingan**

B. Guy Peters mendeskripsikan setidaknya ada lima jenis studi perbandingan politik, yakni (1) Deskripsi politik negara tunggal misalnya di negara X, apa pun X itu. Contohnya adalah penelitian Anderson, 1982; Fitzmaurice, 1981; Rose, 1989; Lal, 1986; Ramage, 1995; (2) Analisis proses dan institusi yang sama pada sejumlah negara yang dipilih secara terbatas (misal pada penelitian Bendix, 1964; Moore, 1966; Skocpol, 1979; Lipset dan Rokan, 1967; Tilly, 1975; 1993; Collier dan Collier, 1991); (3) Studi yang mengembangkan tipologi atau bentuk klasifikasi lainnya dalam

negara atau organisasi atau lembaga dalam negara, menggunakan tipologi baik untuk membandingkan kelompok negara dan untuk mengungkapkan sesuatu tentang politik internal pada masing-masing sistem politik. Model ini dilakukan misalnya oleh Lijphart, 1990; Elazar, 1987; Behler dan Seroka, 1990); (4) Analisis statistik atau deskriptif data dari bagian negara-negara dunia, biasanya dipilih berdasarkan geografis atau alasan lain dengan menguji beberapa hipotesis tentang hubungan variabel dalam 'sampel' negara tersebut. Studi model ini contohnya dilakukan Lange dan Garrett, 1985; Ames, 1987; Kaase dan Newton, 1995; Hyden dan Bratton, 1992); dan (5) Analisis statistik dari semua negara di dunia yang mencoba untuk mengembangkan pola dan/atau menguji hubungan di seluruh berbagai sistem politik, seperti yang dilakukan Banks and Textor, 1963; Banks, 1971; Rummel, 1972; 1979; Russett, 1964; dan Sullivan, 1996.<sup>7</sup>

Studi gerakan politik ini cenderung menggunakan jenis perbandingan politik yang ketiga yakni studi yang mengembangkan tipologi organisasi atau lembaga dalam negara, yang membandingkan gerakan politik antar kelompok untuk mengungkapkan sesuatu tentang politik internal pada masing-masing sistem politik. Sejak studi gerakan politik, maka analisa perbandingan politik ini juga diintegrasikan dengan teori gerakan sosial.

Jenis studi perbandingan politik dalam antar institusi Untaian analisis politik akan memilih sejumlah proses politik dalam institusi

---

<sup>7</sup> B. Guy Peters, *Comparative Politics, Theory And Methods* (London, MacMillan Press Ltd, 1998), hlm. 10.

yang tampak serupa di beberapa cara-cara penting dan menggunakan contoh-contoh untuk menjelaskan baik dari proses atau politik institusi itu sendiri. Dalam praktiknya, studi kasus sering mampu mengatakan banyak hal tentang prosesnya, serta banyak tentang negara. Selanjutnya, perbandingan lintas waktu menjadi penting menjadi elemen analisis.

Menurut Peters, tujuan studi perbandingan politik institusi agak berbeda dengan perbandingan seluruh sistem lainnya. Studi ini bukan untuk menggambarkan dan membandingkan seluruh sistem, melainkan untuk mengembangkan tingkat yang lebih rendah yakni perbandingan institusi atau proses politik tertentu. Dalam konteks ini peneliti menggunakan data komparatif untuk mengembangkan teori dari aspek kehidupan politik.<sup>8</sup>

### **3. Teori Konstruksi Sosial**

Teori konstruksi sosial (*social construction*) Peter L Berger dan Thomas Luckman berpijak pada Sosiologi pengetahuan. Berger and Luckman berpijak pada preposisi dasar bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, adalah objektivasi dari proses subyektif (dan makna) dimana akal sehat antar subyektif dunia dibangun. Ia menyatakan “...*therefore, attempt to clarify the foundations of knowledge in everyday life, to wit, the objectivations*

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

*of subjective processes (and meanings) by which the inter Subjective common-sense world is constructed.”<sup>9</sup>*

Oleh karena konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat.

Teori konstruksi sosial dalam gagasan Berger mengandaikan bahwa agama sebagai bagian dari kebudayaan, merupakan konstruksi manusia. Artinya terdapat proses dialektika ketika melihat hubungan masyarakat dengan agama, agama mengalami proses objektivasi, seperti ketika agama berada di dalam teks atau menjadi tata nilai, norma, aturan dan sebagainya. Teks atau norma tersebut kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam diri individu, sebab agama telah diinterpretasikan oleh masyarakat untuk menjadi pedomannya. Agama juga mengalami proses eksternalisasi karena ia menjadi acuan norma dan tata nilai yang berfungsi menuntun dan mengontrol tindakan masyarakat <sup>10</sup>.

Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Dengan pendekatan dialektika internalisasi, eksternalisasi

---

<sup>9</sup> Peter L Berger and Thomas Luckman, *The Construction of Social Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London, Pinguin Books, 1991), hlm. 33.

<sup>10</sup> I. B. Putera Manuaba, “Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik” 21 (2008).

dan objektifikasi dalam melihat fakta sosial agama, Peter L. Berger telah mengambil kesimpulan bahwa agama berperan dalam mengkonstruksi dunia sosial <sup>11</sup>.

Menurut Berger dan Luckman untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial merupakan hasil (eksternalisasi) dari internalisasi dan objektifikasi manusia terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari <sup>12</sup>. Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat didalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan didalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubjektif tadi, karena Berger menganggap bahwa terdapat subyektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya <sup>13</sup>.

Dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger adalah kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckman mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman

---

<sup>11</sup> Moh Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 40.

<sup>12</sup> Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger," *Society IV* (2016), hlm. 18.

<sup>13</sup> Nur Syam Syam, *Islam Pesisir* (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 37.

kenyataan dan pengetahuan. Realitas (kenyataan) diartikan sebagai suatu kualitas yang terdapat didalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataannya semuanya dibangun dalam definisi subyektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberikan legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberikan makna pada berbagai bidang kehidupan. Berger dan Luckman mengatakan terjadinya dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi <sup>14</sup>.

#### **a. Proses Eksternalisasi**

---

<sup>14</sup> Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari). (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 1.

Produk aktivitas manusia yang berupa produk sosial terlahir dari eksternalisasi individu. Eksternalisasi adalah suatu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Eksternalisasi merupakan keharusan antropologis; keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa-gerak. Keberadaannya harus terus-menerus mencurahkan kediriannya dalam aktivitas. Kebutuhan antropologis itu berakar dalam kelengkapan biologis manusia yang tidak stabil untuk berhadapan dengan lingkungannya<sup>15</sup>

Kedirian manusia adalah melakukan eksternalisasi yang terjadi sejak awal, karena ia dilahirkan belum selesai, berbeda dengan binatang yang dilahirkan dengan organisme yang lengkap. Untuk menjadi manusia, ia harus mengalami perkembangan kepribadian dan perolehan budaya. Keadaan manusia yang belum selesai pada saat dilahirkan, membuat dirinya tidak terspesialisasi dari struktur instinktualnya, atau dunianya tidak terprogram. Dunia manusia adalah dunia yang dibentuk (dikonstruksi) oleh aktivitas manusia sendiri; ia harus membentuk dunianya sendiri dalam hubungannya dengan dunia.<sup>16</sup> Dunia manusia yang dibentuk itu adalah kebudayaan, yang tujuannya memberikan struktur-struktur yang kokoh yang sebelumnya tidak dimilikinya secara biologis. Oleh karena merupakan bentukan manusia, struktur-struktur itu bersifat tidak stabil dan selalu memiliki

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm, 75.

<sup>16</sup> Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (diterjemahkan oleh Hartono dari buku asli *Sacred Canopy*). (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1994, hlm. 5-6.

kemungkinan berubah. Itulah sebabnya, kebudayaan selalu dihasilkan dan dihasilkan kembali oleh manusia. Ia terdiri atas totalitas produk-produk manusia, baik yang berupa material dan nonmaterial.<sup>17</sup>

Masyarakat merupakan bentuk formasi sosial manusia yang paling istimewa, dan ini lekat dengan keberadaan manusia sebagai homo sapiens (makhluk sosial). Maka itu, manusia selalu hidup dalam kolektivitas, dan akan kehilangan kolektivitasnya jika terisolir dari manusia lainnya. Aktivitas manusia dalam membangun-dunia pada hakikatnya merupakan aktivitas kolektif. Kolektivitas itulah yang melakukan pembangunan- dunia, yang merupakan realitas sosial. Manusia menciptakan alat alat, bahasa, menganut nilai-nilai, dan membentuk lembaga-lembaga. Manusia juga yang melakukan proses sosial sebagai pemelihara aturan-aturan sosial.<sup>18</sup>

## **b. Proses Obyektivikasi**

Obyektivasi ialah proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi disebut juga momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia di satu sisi dan realitas sosio-kultural di sisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 9-10.

interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang unik.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-objek.<sup>19</sup>

Selain itu, obyektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat obyektive adalah obyektivitas. Dunia kelembagaan merupakan aktivitas manusia yang diobjektivasi dan begitu pula halnya dengan setiap lembaganya.<sup>20</sup> Masyarakat adalah produk dari manusia. Berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya didasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini kedalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi yang kemudian menghadapi manusia sebagai suatu

---

<sup>19</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKIS, 2005, hlm. 44.

<sup>20</sup> Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 87.

faktasitas diluar dirinya, adalah diletakkan dalam konsep obyektivitas. Dunia yang diproduksi manusia yang berada diluar sana memiliki sifat realitas yang obyektif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobyektivasikan.<sup>21</sup>

### **c. Proses Internalisasi**

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subyektif menafsirkan realitas obyektif. Atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif kedalam struktur-struktur dunia subyektif. Pada momen ini, individu akan menyerap segala hal yang bersifat obyektif dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya

---

<sup>21</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci* ... (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm. 11-14.

sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.<sup>22</sup>

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsure kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.<sup>23</sup>

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama dengan yang lain, sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Lukhmann. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan

---

<sup>22</sup> Peter L. Berger & Thomas Lukhmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, hlm. 188.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

#### **4. Teori Gerakan Sosial dan Gerakan Politik**

Dalam kamus sosiologi, gerakan sosial merupakan istilah yang mencakup tindakan sosial dengan tujuan melakukan reorganisasi sosial. Tujuan dari gerakan sosial dalam pengertian sangat luas diantaranya menggulingkan suatu pemerintahan dan yang sempit seperti membersihkan lingkungan sekitar. Suatu bentuk tindakan sosial dari agen yang berinteraksi satu dengan yang lain dalam suatu grup, kelompok atau dalam komunitas<sup>24</sup> dengan tujuan melakukan sebuah perubahan sosial. Pandangannya terhadap bidang keagamaannya mempunyai daya

---

<sup>24</sup> Nicholas Albercrombie, (et,al), *Sosiology of Dictionary* (England : Penguin Perss, 1984).

tarik yang sangat kuat, mengikat. Sifat yang penting ini yang disebut dengan kharismatik.

Periode 1960-an terjadi perkembangan teori gerakan sosial era baru dimana teori gerakan ini memandang dan menempatkan aktivitas gerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan memiliki nilai positif. Teori gerakan sosial modern juga mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang memfasilitasi tumbuhnya gerakan sosial, kuat lemahnya dan berhasil atau tidaknya sebuah gerakan sosial.

Douglas McAdam dan David A. Snow menyebutkan elemen-elemen gerakan sosial minimum terdiri dari 1) tindakan kolektif atau tindakan bersama, 2) Tujuan yang berorientasi perubahan, 3) Ada keterlibatan dan kepentingan organisasi, 4) Beberapa tindakan kolektif di luar institusi atau perpaduan gerakan institusi dan di luar institusi, seperti demonstrasi di jalanan dan lobi politik.<sup>25</sup> Neill Smelser membagi gerakan sosial menjadi empat komponen dari perilaku kolektif, *pertama* gerakan berorientasi nilai (*the value-oriented movement*), yakni tindakan kolektif yang dilakukan karena suatu interaksi dengan sebuah keyakinan umum (*generalized belief*) untuk menyusun kembali kembali nilai-nilai dalam tindakan sosial. gerakan berorientasi nilai lebih focus pada perubahan fundamental, sehingga lebih ingin merubah sistem dan nilai dasar. Umumnya gerakan seperti ini berbentuk gerakan revolusi. *Kedua*, gerakan

---

<sup>25</sup> Douglas McAdam dan David A. Snow, *Social Movements, Reading of Their Emergence, Mobilization and Dynamic* (Los Angeles, Roxbury Publishing Company, 1997), hlm. xviii.

berorientasi norma (*the norm-oriented movement*), adalah tindakan kolektif yang dibentuk dari sebuah keyakinan umum untuk menyusun kembali norma-norma dalam tindakan sosial. Gerakan berorientasi norma umumnya terbatas dan lebih fokus dalam memproduksi perubahan sistem sosial. Gerakan ini umumnya mengikuti aturan dan institusi yang sudah ada di tengah masyarakat, sering disebut sebagai gerakan reformasi. *Ketiga*, ledakan permusuhan (*the hostile outburst*), adalah tindakan kolektif yang dikerahkan di atas dasar keyakinan umum untuk meminta tanggung jawab dari agen-agen atas keadaan yang tidak diinginkan. *Keempat*, panik (*the craze and panic*), adalah bentuk-bentuk perilaku kolektif yang didasarkan pada redefinisi fasilitas situasional bersama.<sup>26</sup>

Dalam kerangka alur dari gerakan sosial McAdam banyak mengadopsi pendapat ahli gerakan sosial lainnya seperti yang disebutkan McCarthy bahwa gerakan sosial adalah "a set of opinions and beliefs in a population which represents preferences for changing some elements of social structure or reward distributions of a society"<sup>27</sup>. Dari definisi tersebut McAdam menyimpulkan dalam gerakan sosial ada keterikatan pengalaman dan keyakinan yang akan membentuk "collective action". Namun pada sisi yang lain McAdam menunjukkan bahwa kelompok kepentingan (*interest group*), yang juga memiliki tujuan kolektif dan menjadi fenomena kolektif,

---

<sup>26</sup> Smelser Neill, *Theory of Collective Behaviour* (New York, Free Press of Glencoe, 1962).

<sup>27</sup> Baca McCharty dalam Douglas Mc Adam..., *Social Movements*

sedikit berbeda dengan gerakan sosial, walau keduanya saling terhubung. Kelompok kepentingan banyak melakukan loby dan gerakan institusional untuk mencapai tujuan kolektifnya, sementara gerakan sosial lebih bergerak dalam pola di luar institusi. Namun demikian interest group sering juga menjadi bagian dari gerakan sosial yang kemudian melakukan “framing” tujuan kolektif dari gerakan sosial.

Tarrow<sup>28</sup> membedakan gerakan sosial organisasi formal dengan organisasi gerakan kolektif. Perbedaan ini akan berpengaruh bagaimana gerakan sosial tersebut melakukan mobilisasi sumber daya. Memang akan sedikit sulit mengidentifikasi apakah satu gerakan sosial terkoneksi dengan satu atau lebih organisasi formal atau benar-benar gerakan yang muncul dari masyarakat. Namun bila konseptualisasi gerakan sosial itu terlihat maka kualifikasi gerakan sosial tersebut juga akan terlihat.

## **5. Teori Elit Politik**

Sejumlah besar studi tentang elit memusatkan perhatian pada peranan elit di negara-negara sedang membangun dan di negara maju. Peranan elit ternyata berbeda-beda. Dalam beberapa masyarakat tradisional, elit penguasa telah memberikan perlawanan yang kuat terhadap perubahan. Di negara yang melaksanakan modernisasi, ditemukan elit tertentu yang sangat aktif memimpin pembangunan. Suzanne Keller untuk

---

<sup>28</sup> Tarrow Sidney, *Power in Movement; Social Movement, Collective Action and Politics* (New York, Cambridge, University Press, 1994).

menjelaskan keterlibatan elit politik secara personal dalam lapangan politik, sementara konsep elit politik Gaetano Mosca untuk membantu menganalisis posisi elit politik dalam organisasi. Suzanne Keller menegaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan dalam tipe apapun pasti terdapat sekelompok kecil orang yang mampu mengendalikan masyarakat yang lainnya demi kepentingan kelompok kecil tersebut. Suzanne Keller menyebutkan bahwa minoritas yang berkuasa tersebut yang kemudian disebut dengan elit sangat berpengaruh terhadap kejadian-kejadian sosial yang terjadi pada masyarakat dan memerlukan sebuah penelitian untuk membuktikannya. Menurut Suzanne Keller pada perubahan sosial yang cepat peranan dari elit sangat besar sedangkan pada masa stabil para elit akan menyatu dengan zaman elit tersebut ada.<sup>29</sup> Selanjutnya Suzanne Keller mengatakan bahwa tidak semua elit berperan dan mempunyai suatu dampak sosial yang umum dan bertahan, hanya kelompok-kelompok tertentu saja di mana keputusan-keputusannya dan tindakan - tindakannya mempunyai akibat-akibat penting dan menentukan untuk kebanyakan anggota masyarakat. Kelompok-kelompok ini disebutnya sebagai elit penentu yang terdiri dari para pemimpin politik, ekonomi dan militer, para pemimpin moral (elit agama), budayawan (elit budaya), dan kaum intelektual (elit ilmiah)<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Lihat Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995).

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 28

Jika menggunakan konsep Suzanne Keller maka elit politik yang dimaksud dalam studi ini adalah semua tokoh yang memiliki pengaruh politik baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses politik kebijakan beragama. Tokoh-tokoh itu berasal dari organisasi formal, organisasi non-formal atau organisasi informal, seperti lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif, partai politik, media, interest group atau civil society dan tokoh masyarakat yang terhubung dengan gerakan politik kelompok atau organisasi Islam moderat.

Meskipun demikian keputusan atau tindakan-tindakan dari kelompok-kelompok elit-elit politik itu tidak dapat dilepaskan dari posisi organisasionalnya masing-masing, sehingga juga tampak seolah-olah sebagai kelas politik. “Kelas politik” seperti yang dimaksud Gaetano Mosca terdiri dari: (1) personil politik, (2) kaum terpelajar, (3) intelektual kelompok yang berkuasa, (4) kelas menengah, dan (5) orang kaya pada umumnya.<sup>31</sup> Kelima unsur itu semuanya berada di lapisan atas dan disebut sebagai “kelas elit”. Sedangkan di bawahnya, yaitu pada lapisan menengah terdapat sub-elit yang disebut sebagai “kelas menengah baru” yang berfungsi sebagai penghubung antara “kelas elit” (lapisan atas) dan “kelas massa” (lapisan bawah). “Kelas menengah baru” itu terdiri dari (1) para pegawai negeri, (2) manajer dan pekerja kerah putih (3) ilmuwan dan insinyur yang fungsinya selain merupakan unsur penting pemerintahan masyarakat (kelas penguasa dalam arti luas), juga

---

<sup>31</sup> Mosca dalam T.B. Bottomore, *Elite dan Masyarakat*, (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), hlm. 4-20.

sebagai pemasok anggota-anggota baru kepada elit (kelas penguasa dalam arti sempit).

Mengacu pada penjelasan Gaetano Mosca, pengertian “kelas elit” dan atau “kelas politik” selain mencakup anggota-anggota pemerintahan dan pejabat tinggi, pemimpin militer, dan aristokrat yang berpengaruh, juga mencakup “elit tandingan” yang di dalamnya terdapat pemimpin partai yang berada di luar lembaga pemerintahan, wakil-wakil kelompok kepentingan sosial baru, pimpinan kelompok-kelompok keagamaan, kelompok-kelompok pengusaha dan intelektual yang aktif dalam politik. Meskipun dibatasi oleh: (1) aturan hukum sebagai pernyataan kesatuan moral masyarakat secara keseluruhan; (2) kekuatan-kekuatan sosial sebagai wakil berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, semua elemen “kelas politik” secara posisional dapat berpengaruh secara langsung dan menggunakan kekuatan politik dalam mempengaruhi kebijakan baik terang-terangan maupun tersamar. Sehingga fenomena kelas politik selalu mencakup sejumlah kelompok yang terlibat dalam kerjasama, kompetisi dan konflik.

Menilik pendapat ini maka dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dimaksud sebagai elit agama adalah ketua-ketua organisasi agama Islam moderat, kaum terpelajar di organisasi agama tersebut serta pemodal atau individu atau kelompok sumber anggaran organisasi agama . Sementara kelas menengah adalah staff organisasi agama, kaum terpelajar organisasi yang tidak memiliki pengaruh kuat atau ulama yang tidak berpengaruh kuat. Namun demikian dalam konteks ulama dapat terjadi

relativisme lokalitas. Sementara golongan pengikut atau kelas bawah adalah anggota pengurus organisasi keagamaan atau anggota organisasi keagamaan.

Tampak pula bahwa konsep “elit yang memerintah” mengkontraskan “minoritas terorganisir yang memerintah” (elit) dengan “mayoritas yang tidak terorganisir yang diperintah” (massa), sedangkan konsep “kelas yang berkuasa” (elit penguasa) mengkontraskan kelas dominan yang berkuasa dengan kelas tidak dominan yang dikuasai. Berbeda dengan anggota “elit yang memerintah”, anggota “elit penguasa” memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi yang sama dan secara permanen terlibat dalam konflik dengan kelas-kelas lainnya yang menyebabkan kesadaran dan solidaritasnya berkembang secara terus menerus. Dimana komposisi ini akan terlihat jelas ketika sistem pemerintahan representatif dan sistem parlementer diberlakukan. Mosca mengatakan:

“Tidak dapat disangkal bahwa sistem [pemerintahan] representatif memberikan jalan bagi banyak kekuatan sosial yang berbeda untuk berpartisipasi dalam sistem politik dan, dengan demikian, untuk menyeimbangkan dan membatasi pengaruh kekuatan-kekuatan sosial lain dan khususnya pengaruh birokrasi”<sup>32</sup>

Oleh sebab itu meskipun Mosca sebelumnya menegaskan bahwa dalam sistem parlementer wakil tidak dipilih oleh para pemilih, tetapi sebagai suatu aturan, membuat dirinya dipilih

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 6

oleh mereka. Akan tetapi Mosca pada akhirnya juga mengakui semua itu dengan mengatakan bahwa melalui wakil-wakilnya, mayoritas (massa) dapat saja atau mungkin memiliki kontrol tertentu terhadap kebijakan pemerintah.<sup>33</sup> Begitu juga dengan penjelasan H.D. Lasswell yang mengikuti kerangka Mosca. Menurut Lasswell:

“Elit politik terdiri dari dari para pemegang kekuasaan suatu lembaga politik. Para pemegang kekuasaan mencakup kepemimpinan dan formasi sosial yang biasanya merupakan asal-usul para pemimpin, dan kepadanya diberikan pertanggung jawaban, selama suatu jangka waktu tertentu.”<sup>34</sup>

Teori elit memiliki fungsi untuk menjelaskan sekelompok individu yang berada dalam strata sosial yang lebih tinggi atau berada pada puncak strata sosial. Elite adalah sejumlah individu yang memiliki pengaruh dalam organisasi. Dalam perspektif sosiologi, elite lebih ditujukan kepada elite politik. Posisi elite ditempatkan pada wilayah yang sungguh bermakna politik memberikan motif atas suatu tindakan kolektif. Elite adalah sekelompok kecil orang dalam masyarakat yang memegang posisi dan peranan penting. Dalam kehidupan sosial, elite agama yang berada pada puncak strata sosial dengan leluasa menafsirkan doktrin agama yang melembaga. Sebagaimana tafsir doktrin agama kalangan elit untuk kepentingan kolektif, tetapi

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 6

<sup>34</sup> H.D. Lasswell dalam T.B. Bottomore, *Ibid.*, hlm. 10.

sebagian lainnya justru melegitimasi kepentingan elit sendiri.<sup>35</sup> Menurut Sunyoto Usman, elit agama yang berada pada puncak strata mentafsirkan doktrin yang memberi keuntungan dari pihak penguasa dan kelompok elit yang membuat mereka memperoleh privilegès terus-menerus, sehingga menempatkan kedudukan mereka pada posisi yang sangat kuat dalam proses pengambilan keputusan<sup>36</sup>. Elit gerakan politik Islam moderan berperan sebagai kelompok kepentingan dan penekan. Namun, sebagai elit agama, mereka juga memberikan penafsiran doktrin-doktrin agama yang melegitimasi kelas penguasa dan status quo. Dalam hal ini, agama dijadikan rujukan bagi individu pemeluknya dalam memberikan respons atau menyesuaikan diri dengan individu-individu lainnya

## **6. Komunitas Agama**

Istilah kata komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berasal dari kata dasar *communis* yang artinya masyarakat, publik atau banyak orang. Wikipedia Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian komunitas sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya

---

<sup>35</sup> Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2010) hlm. 28.

<sup>36</sup> Sunyoto Usman, 1998, "Ilmu Sosial Modern: Perkembangan dan Tantangan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, volume 1, nomor 3, Yogyakarta: FISIPOL UGM, hlm. 30.

dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.<sup>37</sup>

Secara umum pengertian komunitas adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Ada juga yang menyebutkan bahwa arti komunitas adalah suatu kelompok di dalam masyarakat, dimana para anggotanya memiliki kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas. Misalnya kesamaan minat, kesamaan profesi, kesamaan agama, kesamaan tempat tinggal, dan lain-lain. Menurut Hendro Puspito, pengertian komunitas adalah suatu kelompok sosial atau kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Sementara itu menurut Soenarno, pengertian komunitas adalah suatu identifikasi dan interaksi sosial yang dibentuk dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Sedangkan menurut Kertajaya Hermawan, komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Etienne Wenger, yang berpendapat pengertian komunitas adalah kelompok sosial yang memiliki

---

<sup>37</sup> Ambar Kusumastuti. *Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung Yogyakarta*. (Skripsi Yogyakarta: UNY, 2014).

habitat lingkungan dan ketertarikan yang sama dalam ruang lingkup kepercayaan ataupun ruang lingkup yang lainnya.<sup>38</sup>

Dari pendapat di atas, setidaknya definisi komunitas dapat didekati melalui; pertama, terbentuk dari sekelompok orang; kedua, saling berinteraksi secara sosial diantara anggota kelompok itu; ketiga, berdasarkan adanya kesamaan kebutuhan atau tujuan dalam diri mereka atau diantara anggota kelompok yang lain; keempat, adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok yang lain, misalnya waktu.<sup>39</sup> Pada dasarnya setiap komunitas yang ada itu terbentuk dengan sendirinya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, karena komunitas terbangun memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu dalam kelompok tersebut. Suatu komunitas biasanya terbentuk karena pada beberapa individu memiliki hobi yang sama, tempat tinggal yang sama dan memiliki ketertarikan yang sama dalam beberapa hal. Sementara itu, yang dimaksud dengan agama, secara umum dapat diartikan bahwa agama merupakan rangkaian sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan Kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatan kehidupan. Kata agama, dikenal dengan kata *din* dari bahasa Arab dan kata *religi* dari bahasa Eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Satu pendapat

---

<sup>38</sup> Prawiro, *Pengertian Komunitas: Arti, Manfaat, Jenis, dan Contohnya*, Dikutip dari <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-komunitas.html>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021 Pukul 20.41 Wib.

<sup>39</sup> Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138.

mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata, a = tidak dan gam = pergi, jadi tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun temurun. Agama memang mempunyai sifat demikian. Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Dan agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama berarti tuntunan. Memang agama mengandung ajaran-ajaran yang menjadi tuntunan hidup bagi penganutnya.<sup>40</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam berbagai sumber, kata “agama” diberi arti tidak kacau atau teratur. Maksudnya, orang yang beragama memiliki pedoman yang dapat membuat hidupnya teratur dan tidak kacau. Agama dipahami sebagai keadaan atau sifat kehidupan orang-orang yang beragama. Pengertian ini lebih menunjuk pada hasil atau dampak dari keberagamaan, bukan pada agama itu sendiri. Dengan agama, seseorang atau suatu masyarakat akan hidup tertib dan teratur.<sup>41</sup> Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia, karena agama tidak hanya mengatur kehidupan

---

<sup>40</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 9.

<sup>41</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 67.

manusia di alam akhirat saja, tetapi juga mengatur bagaimana seharusnya hidup di dunia.

Agama mengajarkan nilai-nilai moral dan mengajak manusia berbuat baik dalam hubungannya dengan alam sesama manusia. Dari sudut sosiologi, agama adalah tindakan-tindakan pada suatu sistem sosial dalam diri orang-orang yang percaya pada suatu kekuatan tertentu dan berfungsi agar dirinya dan masyarakat diberikan keselamatan. Agama dipercayai merupakan perintah, hukum, kata-kata yang langsung datang dari Ilahi agar manusia mentaatinya. Dari sudut kebudayaan, agama adalah salah satu hasil budaya. Artinya, manusia membentuk atau menciptakan agama karena kemajuan dan perkembangan budaya serta peradabannya. Dengan itu, semua bentuk-bentuk penyembahan kepada Ilahi misalnya nyanyian, pujian, tarian, mantra dan lain-lain merupakan unsur-unsur kebudayaan. Oleh sebab itu, jika manusia mengalami kemajuan, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan kebudayaan, maka agama pun mengalami hal yang sama. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan ritual, cara penyembahan bahkan ajaran-ajaran dalam agama perlu diadaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi serta perubahan sosio-kultural masyarakat.<sup>42</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan komunitas agama dalam konteks ini adalah kelompok atau organisasi atau

---

<sup>42</sup> Faisal Riza, Irwansyah & Aliansi Sumut Bersatu (ASB), "Agama-agama Leluhur di Sumatera Utara: Eksistensi, Dinamika, dan Masa Depan". (Penelitian Bersama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Aliansi Sumut Bersatu, 2019).

komunitas Islam adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih individu yang saling berinteraksi di lingkungan atau organisasi tertentu dan memiliki orientasi nilai dan pandangan Islam yang sama. Disamping itu secara fisik suatu komunitas Islam biasanya diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis atau kesamaan nilai di masing-masing komunitas. Karenanya akan memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang dihadapinya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya.

## **7. Organisasi Islam Wasathiyah**

Organisasi massa Islam banyak memperkenalkan konsep wasathiyah atau jalan tengah dalam ber-Islam. Konsep wasathiyah yang sering disamakan dengan ‘moderat’ telah diajarkan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang organisasi massa dirikan. Bahkan konsep moderat juga sering disuarakan mereka pada kiprahnya dalam bidang sosial, politik, dan keagamaan lainnya, Karena itu, organisasi tersebut dipandang layak disebut sebagai organisasi massa Islam yang penting dalam akselerasi moderasi yang tidak hanya bagi Sumatera, tetapi sekaligus bagi Indonesia. Nahdlatul Ulama, Al Wasliyah, dan Muhammadiyah, juga merupakan penyangga moderasi di samping organisasi lainnya. Dikatakan demikian, karena melalui tiga ormas Islam ini, Indonesia kemudian menjadi pilot proyek toleransi bagi negara-negara lain.<sup>43</sup> Dijumpai informasi pula,

---

<sup>43</sup> Novriantoni Kahar, "Islam Indonesia Kini: Moderat Keluar, Ekstrem di Dalam?", dalam <http://islamlib.com/id/artikel/islam-indonesia-kini-moderat->

bahwa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa Islam dengan jumlah jamaah terbanyak di Indonesia kerap disematkan padanya sebagai pengusung gagasan tasamuh, tawasuth, i'tidal, dan tawazun.<sup>44</sup>

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, Nahdlatul Ulama, Alwasliyah dan Muhammadiyah, merupakan ormas Islam yang sering turun ke lapangan dalam membangun dan menciptakan dialog, baik intern, antar, dan antara umat beragama dengan pemerintah, dengan tujuan membendung gelombang radikalisme. Dengan demikian, agenda Islam moderat yang mereka bentangkan tidak bisa dilepas dari upaya membangun kesaling-pahaman (mutual understanding) antar peradaban.

Sikap moderasi Nahdlatul Ulama, Alwasliyah dan Muhammadiyah, pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlusunnah wal-Jamaah (Aswaja) yang dapat digolongkan sebagai dasar paham moderat. Sebut saja, misalnya Nahdlatul Ulama dalam Anggaran Dasarnya dinyatakan sebagai berikut: “Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal-Jamaah dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf

---

keluar-ekstrem-di-dalam/-2009. Diakses, tanggal 19 September 2018, pukul 21.25 WIB.

<sup>44</sup> Ahmad Zainul Hamid. “NU dalam Persinggungan Ideologi: Menimbang Ulang Moderasi Keislaman Nahdatul Ulama”. Afkar, No. 21 (2007), hlm. 28.

mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali”.<sup>45</sup>

Penjelasan secara rinci, bahwa dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlusunnah wal-Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Mansyur Al-Maturidi. Dalam bidang fiqh, mengikuti jalan pendekatan (*al-manhaj*) dari Abu Hanifah Al-Nu'man, Imam Malik ibn Anas, Imam Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbali. Dalam bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Imam al-Ghazali, serta imam-imam yang lain.<sup>46</sup> Perkataan Ahlusunnah wal-Jamaah juga dapat diterjemahkan sebagai “para pengikut tradisi Nabi Muhammad Saw., dan ijma' (kesepakatan) ulama”.<sup>47</sup> Sementara itu, watak *tawassuth* merupakan ciri Ahlusunnah wal-Jamaah yang paling menonjol, di samping *i'tidal* (bersikap adil), *tawazun* (bersikap seimbang), dan *tasamuh* (bersikap toleran). Karena itu, mereka menolak segala bentuk tindakan dan pemikiran ekstrem (*tatharruf*) yang dapat melahirkan penyimpangan dan penyelewengan dari ajaran Islam.

Dalam pemikiran keagamaan juga dikembangkan keseimbangan (jalan tengah) antara penggunaan wahyu (*naqliyah*) dan rasio (*'aqliyah*), sehingga dimungkinkan dapat terjadi akomodatif terhadap perubahan-perubahan di masyarakat

---

<sup>45</sup> Lihat, AD ART NU, Bab II Pedoman, Aqidah, dan Asas pasal 5.

<sup>46</sup> Mujamil Qomar, NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 62.

<sup>47</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 148.

sepanjang tidak melawan doktrin-doktrin dogmatis. Masih sebagai konsekuensinya terhadap sikap moderat, Ahlusunnah wal-Jamaah juga memiliki sikap-sikap yang lebih toleran terhadap tradisi dibanding dengan faham kelompok-kelompok Islam lainnya. Bagi Ahlusunnah wal-Jamaah, memelihara adat (kebiasaan suatu masyarakat) mempunyai arti penting dalam beragama. Sebuah adat tidak mesti langsung dihilangkan seluruhnya, namun tidak juga diterima secara total. Adat tersebut secara bertahap diisi dengan nilai-nilai Islam.

Ormas Muhammadiyah sejak awal didirikan oleh Ahmad Dahlan dan sejumlah tokoh awal lainnya telah menyuarakan konsep moderasi dalam beragama. Salah satu pelajaran berharga dari Dahlan adalah komitmennya yang kuat dalam mempraktikkan sikap moderat serta toleransi dalam beragama.<sup>48</sup> Pada kepemimpinannya, Muhammadiyah sering diinformasikan sebagai ormas Islam yang kerap melakukan kerjasama yang tidak terbatas hanya pada kelompok Muslim, akan tetapi hampir semua kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keyakinan. Salah satu model kasus, misalnya, kemampuan Dahlan yang bersahabat erat dengan banyak pemuka agama Kristen. Atas kemampuannya itu, Dahlan dikenal sebagai orang yang toleran terhadap kaum misionaris. Namun demikian, tidak berarti bahwa Dahlan mengkompromikan prinsip-prinsip dari kedua agama itu. Dahlan tetap pada keyakinannya, bahwa ia

---

<sup>48</sup> Miftahuddin, "Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis", dalam MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, vol. V No. 1, Januari 2010, 49-50.

hanyalah seorang praktisi dialog intern, antar, dan antara umat beragama dengan pemerintah, sebagai sebuah keniscayaan kehidupan beragama.<sup>49</sup>

Tali persaudaraan antar sesama --Muslim dan non-Muslim-- harus terus dibangun secara seksama dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran dasar Islam sebagaimana telah ditransmisikan wali songo dan para ulama terdahulu di Indonesia. Teladan moderasi yang disemaikan para pendahulu harus tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi kemudian. Salah satu cara merawat Islam moderat adalah dengan terus mengawal citra agama ini dari gempuran pemahaman kelompok ekstrem, seperti: kelompok liberal, plural, sekular, serta munculnya kelompok radikal. Menjaga keutuhan syari'at Islam dan mengamalkan konsep moderat (*wasahiyah*) dalam Islam, hingga terciptanya rasa kasih sayang terhadap sesama dan rasa saling menghormati. Setiap individu maupun kelompok harus berupaya saling menghargai perbedaan dan keberagaman. Perbedaan dan keragaman merupakan sunatullah yang tidak dapat dipungkiri. Melalui keragaman tersebut umat Islam harus mampu mewujudkan citra Islam yang berada di tengah-tengah tanpa kecenderungan mendukung ke golongan tertentu. Tentu, dengan terwujudnya sikap moderat pada tubuh Islam akan menegaskan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 311-312.

<sup>50</sup> Miftahuddin, "Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis", dalam *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. V No. 1, Januari 2010, 42-43.

Al-Washliyah sejak awal berdirinya menganut paham Ahlusunnah wal-Jamaah. Taufik Abdullah, mengelompokkan pola pemikiran ulama Jam'iyatul Washliyah ke dalam kelompok tradisionalis.<sup>51</sup> Jam'iyatul Washliyah menurut Boland sebagaimana dikutip Steenbrink, dapat disebut sangat ortodoks dan konservatif. Namun, Steenbrink menyatakan, bahwa organisasi ini juga dapat dikatakan modern, karena cikal bakal berdirinya adalah para pelajar MIT yang merupakan sekolah Islam modern di Medan saat itu. Bahkan menurut Steenbrink, sebutan reformis juga bisa ditujukan kepada Al- Washliyah. Hal ini dibuktikan dari program pengiriman mahasiswa ke Cairo, serta usaha mendirikan sekolah umum, yang mengikuti model gubernemen.<sup>52</sup>

Al-Washliyah juga merupakan organisasi yang cenderung bersifat terbuka dan aspiratif terhadap perkembangan serta tidak menutup diri dalam menjalin kerja sama dengan kelompok umat Islam modernis. Hal ini dapat dilihat dari program studi banding bidang pendidikan pada tahun 1934 yang dilakukan Jam'iyatul Washliyah ke Sumatera Barat yang sudah mengalami proses pembaharuan terlebih dahulu<sup>53</sup> dan pendudukan kegiatan prangko amal yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada tahun 1941.<sup>54</sup> Pada bidang tasawuf, AL-

---

<sup>51</sup> Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 29.

<sup>52</sup> Karl A. Steenbrink, *Pesantren, madrasah, sekolah : pendidikan Islam dalam kurun moderen*, (Jakarta: LP3ES, 1986), 78-79.

<sup>53</sup> Chalijah Hasanuddin, *Al-Jam'iyatul Washliyah Api Dalam Sekam*, (Bandung: Pustaka, 1988), 77-78.

<sup>54</sup> Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang* (Jepang: Pustaka Jaya, 1980), 126.

Washliyah dapat dikatakan berbeda dengan kecenderungan umum organisasi-organisasi Islam tradisional lainnya, mereka tidak mengembangkan tarekat.<sup>55</sup>

Sedangkan untuk mencapai tujuan organisasi, menurut Anggaran Dasar tahun 1950, Al- Washliyah melakukan usaha-usaha 1) memperkuat perhubungan persaudaraan di antara kaum muslimin dan berbuat baik serta berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam jang memusuhi kaum Muslimin dalam agama dan negerinya; 2) memperbanyak tablig, tazkir, dan pengajian di tengah-tengah kaum muslimin; 3) menyampaikan seruan Islam kepada orang yang belum beragama Islam; 4) mendirikan rumah-rumah perguruan dan mengatur kesempurnaan pelajaran dan pendidikan; 5) menerbitkan kitab-kitab, surat kabar, majalah, surat siaran, mengadakan taman bacaan dan gedung kitab; 6) mengadakan pertemuan-pertemuan yang mencerdaskan pikiran dan memperdalam pengetahuan; 7) mendirikan, memperbaiki dan memelihara tempat ibadah; 8) menyantuni dan memelihara fakir miskin dan anak yatim; 9) memajukan dan menggembirakan penghidupan dengan jalan yang halal; 10) mempersiapkan kaum muslimin dalam menegakkan dan mempertahankan kebenaran dan keadilan; 11) mengusahakan berlakunya hukum Islam; 12) dan lain-lain yang ditimbang perlu menurut putusan musyawarah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Chalijah Hasanuddin, 115-118.

<sup>56</sup> Pengurus Besar Al-Washliyah, "Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al-Djamiatul Washlijah," dalam Al-Jam'iyatul Washlijah ¼ Abad, ed. Nukman Sulaiman, (Medan: PB Al-Washliyah, 1955), 342).

## **8. Kebijakan Publik**

Proses pengambilan kebijakan selalu diwarnai dengan konflik-konflik politik. Ramlan Surbakti, (1993:153) menjelaskan bahwa konflik politik yang terjadi antar kelompok dalam proses pengambilan sebuah kebijakan pada dasarnya karena masing-masing kelompok berupaya keras untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama dan jumlahnya terbatas, misalnya jabatan politis, kekuasaan, pengaruh ataupun legitimasi dan pengakuan dari masyarakat. Konflik politik berakhir manakala telah tercapai suatu consensus bersama antar aktor politik dalam suatu pengambilan kebijakan. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor bukan pemerintah (Budi Winarno, 2005: 17). Kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, pada dasarnya proses pembuatan kebijakan pendidikan bukan menjadi monopoli birokrasi pemerintah yang mengurus pendidikan akan tetapi kekuatan-kekuatan diluar itu pun bisa memberikan pengaruh. Dalam penyusunan agenda kebijakan pendidikan, proses masuknya suatu isu menjadi agenda kebijakan merupakan suatu proses yang memiliki dosis politik sangat tinggi, yang berlangsung dalam lingkungan pemerintahan. Pemerintah yang sedang berkuasa kadang kala menggunakan kekuatannya untuk menggagalkan sebuah issue yang sedang muncul ke permukaan masuk kedalam kebijakan.

Setelah suatu isu berhasil masuk menjadi agenda kebijakan maka tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan pendidikan. Menurut Soenarko (2000: 132), formulasi kebijakan merupakan kegiatan perencanaan dengan meletakkan keputusan-keputusan hasil analisis masalah dalam rancangan kebijakan pemerintah. Dalam proses formulasi kebijakan tidak semua aktor pasti terlibat dalam perumusan kebijakan. Dalam sistem pemerintahan desentralistis yang ditandai dengan adanya otonomi daerah berimplikasi pada banyaknya aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal yang terorganisir dan memiliki simbol kultural lokal kembali berada di panggung politik. Bahkan di beberapa daerah efeknya cukup signifikan, yaitu pelaku politik seperti pemda, politisi lokal, organisasi nonpemerintah (NGOs), dan elite lokal sering menjadi immune terhadap intervensi dari pusat.

## **B. KERANGKA KONSEP**

Dalam Penelitian ini, konsep penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Indikator moderasi beragama meliputi penghormatan dan pelaksanaan nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan, penghormatan dan pelaksanaan musyawarah dan

kesepakatan antar pemeluk agama dan penghormatan serta pelaksanaan ketertiban umum.

2. Konflik antar umat beragama adalah pertentangan, persinggungan dan tindakan antara dua atau lebih komunitas umat beragama yang berpotensi dan atau menggunakan kekerasan dalam proses penyelesaiannya.
3. Gerakan moderasi beragama adalah gerakan sosial dengan tujuan perubahan atau mempertahankan norma atau nilai moderasi beragama dimulai dari *proses collective memory*, *collective consciousness*, *collective objective* dan *collective action* yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh kumpulan orang, komunitas dan atau organisasi agama.

### **C. PENELITIAN TERDAHULU.**

Kajian tentang konflik antar umat beragama sudah banyak dilakukan, baik oleh perguruan tinggi maupun oleh lembaga lainnya yang muncul di tengah masyarakat. Sejauh ini hasil penelitian yang telah terbit dalam bentuk buku dan hasil penelitian, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Wawan Hernawan, M.Ag., Usep Dedi Rostandi, Lc. M.Ag, dan Dr. Didin Komarudin, M.Ag. yang berjudul “Gerakan Islam Moderat di Jawa Barat”. Pandangan Lima Ormas Islam Moderat Terhadap Kasus Intoleransi pada tahun 2018. Hasil penelitian menemukan berbagai bentuk konstalasi politik, aktivisme Islam yang menjadi pemicu gerakan intoleransi. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisa deskripsi dan analisa respon. Pendekatan teoritis dan analisis ini yang membedakan penelitian di Jawa

Barat dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Daripada melihat respon pada situasi eksternal, maka penelitian ini menginterpretasi gerakan politik yang dilakukan internal Islam moderat inter dan antar organisasi keagamaan. Objek konstruksi dan respon pada dua penelitian juga berbeda, dimana di Jawa Barat objek respon adalah peristiwa intoleransi sementara objek konstruksi penelitian yang akan dilakukan adalah gerakan Islam moderat dalam politik kebijakan keberagamaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lorraine V. Varagon tentang “Konflik di Sulawesi Tengah” pada tahun 2001 di mana ditemukan bahwa persaingan elit untuk menjadi penguasa telah berubah menjadi konflik politik identitas keagamaan dan kemudian menjadi konflik politik identitas etnis sejak tahun 1999. Penelitian yang dituangkan dalam buku Politik Lokal Indonesia, Henk Schulte Nordholt, 2007 ini sangat detail dalam mengungkap bagaimana hubungan agensi lokal dan agen negara yang menggunakan politik agama dan etnis dalam perebutan kekuasaan lokal. Namun penelitian ini gagal mengungkapkan narasi sejarah dinamika hubungan antar umat beragama dan dinamika konflik sebelum 1999 serta faktor ideologis yang menyebabkan konflik kekerasan. Alih-alih penelitian tersebut meletakkan desentralisasi sebagai pemicu utama dari konflik yang muncul. Maka penelitian yang akan dilakukan ini akan mengungkap sejarah dan dinamika konflik serta hubungan antar umat beragama di wilayah penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Nurhasim dan kemudian dituliskan pada tahun 2006 menjadi sebuah buku

berjudul “Kekerasan Komunal, anatomi dan resolusi konflik di Indonesia” dapat mendeskripsikan bagaimana situasi konflik di Ambon dan resolusi konflik yang dilakukan. Namun penelitian ini tidak mengurai secara jelas bagaimana relasi sosiologis umat beragama, dalam hal ini konteks keberagamaan, dengan dinamika konflik yang terjadi, dan bagaimana dinamika keberagamaan tersebut berkembang paska konflik.

4. Mun'im A. Sirry dalam Hasanudin, *Kerukunan Hidup Beragama Sebagai Pra Kondisi Pembangunan*, Jakarta: Depag, 1981, menyatakan bahwa perbedaan agama sama sekali bukan halangan untuk melakukan kerjasama (dalam bidang sosial), bahkan al-Qur'an menggunakan kalimat “*lita'arafu*”, supaya saling mengenal, yang kerap diberi konotasi “saling membantu”. Nabi Muhammad Saw sendiri memberi banyak teladan dalam hal ini. Misalnya, Nabi pernah mengizinkan delegasi Kristen Najran yang berkunjung di Madinah untuk berdoa di kediaman beliau tatkala menjadi pemimpin Madinah, beliau pernah berpesan: “Barangsiapa mengganggu umat agama Samawi, maka ia telah mengganguku”. Hubungan sesama warga Negara yang muslim dan yang non muslim sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, kebajikan dan kasih sayang yaitu asas yang tidak pernah dikenal oleh kehidupan manusia sebelum Islam dan masih merupakan barang langka sehingga menyebabkan umat manusia merasa mengalami berbagai penderitaan yang amat pedih.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Hasanudin, *Kerukunan Hidup Beragama Sebagai Pra Kondisi Pembangunan*, (Jakarta: Depag, 1981), hlm. 7

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Idris Djamaluddin pada tahun 2016 di kota Para-para dengan judul penelitian “Pola-pola hubungan antar umat beragama (Studi Terhadap Prilaku Toleransi Masyarakat Muslim di kota Pare-para). Penelitian ini menemukan bahwa integrasi sosial yang kemudian diidentifikasi sebagai bentuk perilaku toleran masyarakat muslim terhadap umat beragama didasarkan pada a) usaha bersama dalam kepentingan kebutuhan ekonomi, b) faktor budaya kebhinekaan yakni ajaran adat istiadat masing-masing etnis warga, c) faktor politik dengan ditandai toleransi antar umat beragama. Namun demikian, pertama penelitian ini terbatas untuk wilayah local;kota pare-para yang artinya sangat terbatas dalam etnisitas dan budaya bangsa dibandingkan dengan situasi masyarakat di Indonesia. Kedua, Tidak begitu dalam tergali faktor politik dan ajaran budaya serta agama yang mendorong bagaimana sikap dan prilaku hubungan antar umat beragama.
6. Karya Muhammad Sabri tahun 1999 yang berjudul “*Keberagaman yang saling menyapa, perspektif Filsafat Parennial*”, diterbitkan oleh Bigraf memberikan penjelasan tidak saling mengklaim bahwa agamanya yang paling benar merupakan penghubung universal. Sementara penelitian ini tidak saja fokus pada penghubung persamaan, dimana dimungkinkan dalam sejarah agama memiliki kesamaan asal usul tetapi juga melihat hakekat perbedaan yang kemudian ditelusuri bagaimana antar umat beragama membingkai kerjasama, kerukunan, kedamaian antara pemelukagamainnya yang berbeda tersebut. Pendapat moderatif ini dilakukan pengembangan oleh peneliti

pada penelitian konflik dan gerakan moderasi beragama, di mana variabel tidak saling klaim kepalingbenaran agama dipraktikkan dalam gerakan moderasi beragama. Atau saling klaim kebenaran pada dua provinsi menjadi pemicu konflik antar umat beragama

# **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Adapun metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisa perbandingan (*comparative analysis*) dan pemetaan sosial memadukan pendekatan geografis, demografis dan sosiologis. *Comparative approach* merupakan bagian penelitian studi kasus, seperti yang diungkapkan Yin dan Stake dalam karya Creswell *case studies are design of inquiry found in many fields, especially evaluation, in which the researcher develops an in-depth analysis of a case, often a program, event, activity, process, or one or more individual*<sup>58</sup>. Pada konteks penelitian ini studi perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan situasi dan faktor pemicu konflik di dua provinsi, serta perbandingan pola gerakan moderasi beragama, termasuk perbandingan protagonist dan antagonist aktor di dua provinsi.

Data primer berdasarkan data diperoleh berada di lapangan dan data sekunder berasal dari dokumen, hasil penelitian dan buku terkait fokus penelitian. Sebagai penelitian kualitatif, maka hasil temuannya tidak mesti diperoleh melalui logika sistimatis, prinsip angka dan metode statistik, hanya diuraikan dalam bentuk narasi,

---

<sup>58</sup> Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 43.

namun tetap berpijak pada data dan fakta yang diperoleh dari informasi tertulis, hasil wawancara dan hasil observasi.<sup>59</sup>

Pendekatan lainnya sebagai pendukung ialah pendekatan fenomenologis, yang berpusat pada upaya menangkap fenomena di sekitar manusia, yang dalam hal ini studi Keislaman<sup>60</sup> dan studi beragama.

## **2. Lokasi Penelitian.**

Penelitian ini dilaksanakan di 2 (dua) propinsi; Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Dua propinsi ini mewakili karakter wilayah yang mayoritas Muslim pernah terjadi konflik, dan yang mayoritas Kristen belum pernah terjadi konflik besar. Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan kepada perihal-perihal pilihan yang disebutkan di atas.

## **3. Subjek Penelitian/Informan Kunci**

Adapun subjek penelitian atau informan kunci dalam penelitian ini adalah

- a. Empat tokoh agama pada agama yang berbeda di masing-masing provinsi (delapan informan kunci)
- b. Dua kepala dinas Kesbangpolinmas provinsi
- c. Dua kakanwil Kemenag di dua provinsi

---

<sup>59</sup>Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Rosyda Karya, 2001), hlm. 150.

<sup>60</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 234-235 dan bisa juga dilihat Harry Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 26-44.

- d. 40 peserta FGD dari latar belakang tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, jurnalistik dan pemerintahan

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian **KONFLIK DAN GERAKAN MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA**, sebagai berikut:

- 4.1. Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan dan menganalisa data-data dokumen hasil laporan penelitian, investigasi dan juga membaca buku yang berkaitan dengan **Konflik Dan Gerakan Moderasi Beragama di Dua Provinsi; Sulawesi Utara dan Sumatera Utara**.
- 4.2. Observasi, (*participant observation*), tim peneliti terlibat langsung dalam pengamatan bagaimana sikap, dan tindakan individu dan atau masyarakat dalam gerakan moderasi beragama di kedua provinsi;
- 4.3. Wawancara mendalam (*depth interview*), yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada semua informan yang terkait dengan persoalan yang sedang dikaji, terutama kepada tokoh agama, masyarakat, pimpinan pemerintahan, akademisi.
- 4.4. *Focus Group Discussion (FGD)*. Hasil wawancara dikonsolidasikan dan menjadi bahan dasar dalam merumuskan FGD bagi akademisi, pemerintahan dan tokoh agama khusus di dua provinsi; Sulawesi Utara dan Sumut. Adapun peserta FGD adalah pejabat pemerintahan, tokoh agama, dan akademisi yang berjumlah 20 orang.

## 5. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian di lapangan guna mengumpulkan Data sekunder telah dimulai sejak bulan Juli 2022. Sementara penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dilakukan pada bulan Agustus 2022. Adapun jalannya pelaksanaan penelitian lapangan untuk pengumpulan data primer adalah sebagai berikut;

- a. Merumuskan Kerangka Acuan pelaksanaan Focus group discussion di Sumatera Utara yang dipusatkan di kota Medan dan di provinsi Sulawesi Utara yang dipusatkan di Kota Manado.
- b. Pengurusan ijin pelaksanaan penelitian termasuk mengundang para pemangku kepentingan yang menjadi narasumber dari diskusi kelompok terfokus di kedua provinsi
- c. Pelaksanaan Wawancara mendalam;
  - c.1. Wawancara mendalam di lakukan di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Adapun subjek wawancara mendalam di provinsi Sumatera Utara adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, Perwakilan Gereja Katolik yang menjadi pengurus FKUB provinsi Sumatera Utara, Pengurus HKBP provinsi Sumatera Utara, Kepala dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara serta Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama RI provinsi Sumatera Utara. Wawancara dilakukan pada rentang waktu minggu pertama dan kedua Agustus 2022.

c.2. Wawancara mendalam di provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada minggu ke empat Agustus 2022 kepada Perwakilan umat Katolik Sulawesi Utara, Ketua FKUB Sulawesi Utara sekaligus pendeta GMIM di Manado, Perwakilan Muhammadiyah sekaligus pengurus FKUB Sulawesi Utara, akademisi IAIN Manado, Kepala Bidang Pesantren Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang sekaligus merupakan sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Utara dan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara

d. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)

d.1. FGD di provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di kota Medan pada tanggal 2 Agustus 2022 di hotel Grand Inna Medan. Narasumber pada FGD yang sekaligus menjadi pemantik FGD adalah Dr. Arifinsyah MA yang juga merupakan ketua Forum Kesatuan Bangsa provinsi Sumatera Utara. Moderator pada FGD adalah Marzuki, MA. Adapun peserta sekaligus narasumber dari FGD adalah perwakilan dari MUI provinsi Sumatera Utara, akademisi Sumatera Utara, perwakilan dari LPPKUB provinsi Sumatera Utara, perwakilan MATAKI Konghucu Sumatera Utara, perwakilan Walubi Sumatera Utara, Perwakilan dari Parisada Hindu Darma, Perwakilan journalist dari harian Waspada dan Analisa, Perwakilan dari Gereja Katolik Sumatera Utara,

Perwakilan Sinode HKBP provinsi Sumatera Utara, Perwakilan dari akademisi dan praktisi perbandingan agama Sumatera Utara, Perwakilan Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perwakilan dari GPI.

- d.2. FGD di provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2022 di Hotel Gran Puri Kota Manado. Adapun Narasumber sekaligus pemantik dari FGD adalah Dr. Nasruddin Yusuf M.Ag dan yang menjadi moderator adalah Taufiq M.Pdi. Adapun peserta sekaligus narasumber FGD adalah dua perwakilan budayawan Sulawesi Utara, dua orang perwakilan jurnalis, agamawan Kristen, Agamawan Protestan, agamawan Katolik, agamawan Budha, agamawan Hindu, Ketua MUI Sulawesi Utara, agamawan Konghucu sekaligus ketua MATAKI Sulawesi Utara, Cendikiawan Hindu, cendikiawan Kristen, cendikiawan Katolik dan dua Cendikiawan Islam.

## **6. ANALISIS DATA**

Data yang telah terkumpul dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik Miles dan humberman, diintegrasikan dengan analisa perbandingan atau comparative analysis pada dua provinsi; Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.

Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*<sup>61</sup>.

1. Reduksi data (*data reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang utama terkait faktor konflik antar umat beragama, aktor dan pengelolaan konflik, kemudian menemukan tema-tema dari berbagai peristiwa dan perspektif serta seterusnya mengidentifikasi berbagai pola konflik dan gerakan moderasi beragama. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mengidentifikasi data kembali bilamana dibutuhkan
2. Tahapan proses analisa data yaitu data display. Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.<sup>62</sup> Untuk itu peneliti mendisplay seluruh data yang telah direduksi terkait variabel konflik antar umat beragama dan juga display variabel gerakan moderasi beragama. Seluruh data yang didisplay sudah dilakukan pengkomparasian berdasarkan kategori peneliti. Untuk memperkuat teks analisis naratif, data juga didisplay

---

<sup>61</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 19.

<sup>62</sup> Ibid. hlm 249

dalam bentuk bagan, tabel dan gambar sebagai pendukung data utama yang ada.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas yang berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>63</sup> Maka proses analisis penelitian ini dilakukan sejak data awal dikumpulkan. Kesimpulan terkait konflik dan gerakan moderasi beragama yang ditarik pada awalnya bersifat sangat tentatif. Agar kesimpulan lebih memunculkan temuan kebenaran dan teori maka verifikasi atas temuan dan preposisi kesimpulan awal dilakukan sepanjang penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan teknik triangulasi yang dipergunakan. Analisa perbandingan dan teknik Miles – Huberman diperkuat dengan analisa pola konflik dan gerakan moderasi beragama dengan menggunakan *software* analisa kualitatif N-Vivo pada tahap reduksi data dan *display* data.

## 7. VALIDASI DATA

Setiap data yang diperoleh tidak serta merta menjadi bagian dari hasil penelitian, karena semua data divalidasi dengan metode triangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi metode

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Triangulasi pengumpulan data yaitu perpaduan antara metode pengamatan, analisa data sekunder dan wawancara. Sementara triangulasi sumber data yakni berdasarkan data tertulis; dokumen, pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berbeda tentang satu fokus penelitian, yaitu masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, dan Pemerintahan.

# **BAB IV**

## **DESKRIPSI UMAT BERAGAMA**

### **SUMATERA UTARA DAN SULAWESI**

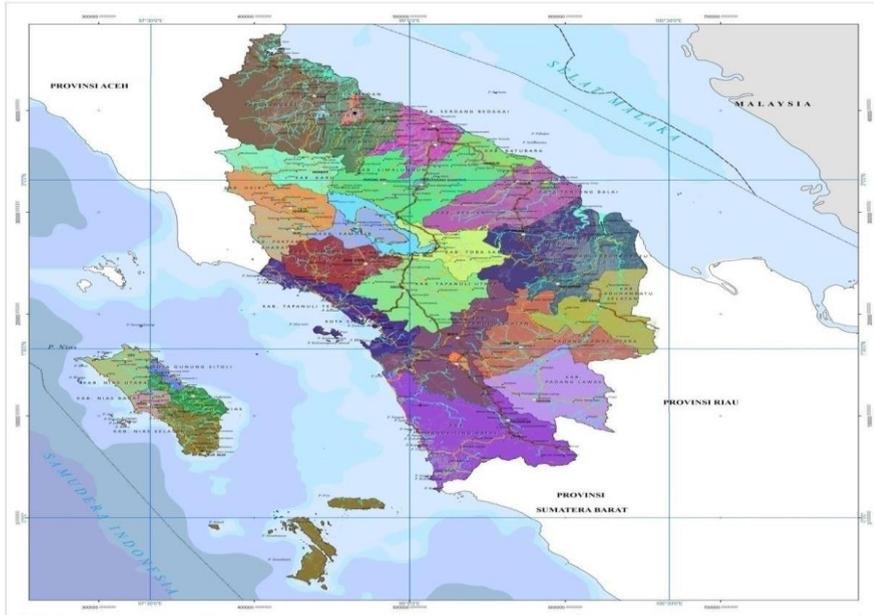
#### **UTARA**

#### **A. Geografi dan demografi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara**

##### **A.1. Geografi dan demografi**

##### **A.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Sumatera Utara**

Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 ha dan luas lautan 11.000.000 ha. Luas lautan mencapai 60,5 persen, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km. Luas daratan Sumatera Utara sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 232 (BPS, 2020).



Sumber : Perda No.2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

Gambar 4.1. : Peta Wilayah Administrasi Sumatera Utara

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 450 kecamatan, 5.417 desa dan 693 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara**

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba	Balige	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02

08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.369,00
10. Dairi	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. Karo	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.596,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.570,98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.202,78
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	473,73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	41,31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	107,83
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	55,66
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	31,00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	59,19
32. Padangsidempuan	Padangsidempuan	6	42	37	114,66
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	280,78
SUMATERA UTARA	Medan	450	5417	693	72.981,23

*Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2020*

### A.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara

Luas Wilayah provinsi Sulawesi Utara tercatat 13.892 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2.871,65 km<sup>2</sup> atau 20,67 persen dari wilayah Sulawesi Utara. Lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara

<b>Kabupaten/Kota Regency/Municipality Luas</b>	<b>Ibukota Kabupaten/Kota Capital of Regency/Municipality</b>	<b>Total Area (km<sup>2</sup>/sq.km)</b>
<b>Kabupaten/Regency</b>		
1. Bolaang Mongondow	Lolak	2.871,65
2. Minahasa	Tondano	1.114,87
3. Kepulauan Sangihe	Tahuna	461,11
4. Kepulauan Talaud	Melonguane	1.240,40
5. Minahasa Selatan	Amurang	1.409,97
6. Minahasa Utara	Airmadidi	918,49
7. Bolaang Mongondow Utara	Boroko	1.680,00
8. Siau Tagulandang Biaro	Ondong Siau	275,86
9. Minahasa Tenggara	Ratahan	710,83
10. Bolaang Mongondow Selatan	Bolang Uki	1.615,86
11. Bolaang Mongondow Timur	Tutuyan	910,18
<b>Kota/Municipality</b>		
1. Kota Manado	Manado	157,27
2. Kota Bitung	Bitung	302,89
3. Kota Tomohon	Tomohon	114,20
4. Kota Kotamobagu	Kotamobagu	108,89
Sulawesi Utara	Manado	13 892,47

Sumber: BPS Sulawesi Utara 2022

Peta provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini



memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

Sementara Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado terletak antara  $00^{\circ}15'$  –  $05^{\circ}34'$  Lintang Utara dan antara  $123^{\circ}07'$  –  $127^{\circ}10'$  Bujur Timur. Sulawesi Utara berada di wilayah Tengah Indonesia dan memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian Barat dan perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian timur.

#### b. Posisi Geostrategis

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Aceh

Sebelah Barat : Samudera Hindia

Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Sementara provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan negara lain dan satu provinsi lain. Batas-batas Sulawesi Utara sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik di sebelah utara  
Sebelah Timur : Laut Maluku  
Sebelah Selatan : Teluk Tomini  
Sebelah Barat : Provinsi Gorontalo

c. Kondisi/Kawasan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa kondisi kawasan yaitu pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Kondisi pesisir wilayah Sumatera Utara meliputi 68 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu 23 kecamatan di wilayah Pantai Barat dan 31 kecamatan di wilayah Pantai Timur, 14 kecamatan di wilayah Kepulauan Nias.

Kondisi wilayah Sumatera Utara yang merupakan wilayah pegunungan atau berada di atas ketinggian 600 mdpl seluas 2.478.735 ha atau sebesar 33, 96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

Kondisi kepulauan meliputi 232 pulau. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Berhala di Pantai Timur, dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga di wilayah Pantai Barat.

Sementara kondisi kawasan provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah

Istimewa Aceh. Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan-bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, sedangkan dalam Bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2.000-3.000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah kota Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu udara rata-rata 25 °C. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat 30 °C dan suhu udara minimum rata-rata 22,1 °C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur dipengaruhi pula oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Semakin tinggi letaknya, maka semakin rendah pula suhunya, dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6 °C.

Provinsi Sulawesi Utara terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 - 1995 m. Kondisi geologi sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda, sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut gunung merapi aktif yang padam menghiasi Minahasa bagian tengah, daerah Bolaang Mongondow dan kepulauan Sangihe.

Material-material yang dihasilkan letusannya berbentuk padat serta lain-lain bahan vulkanik lepas. Semua vulkanik ini berbentuk pegunungan (otogenisa) menghasilkan morfologi yang berbukitbukit dan bergunung-gunung dengan perbedaan relief topografik yang cukup besar.

Provinsi Sulawesi Utara terdapat 5 wilayah yang di kelilingi oleh gunung api aktif yakni Kabupaten Bolang Mongondow yakni gunung Ambang dengan ketinggian 1.689 m, Kabupaten Minahasa Selatan dengan gunung Soputan dengan ketinggian 1.783 m, Kota Tomohon dengan gunung Lokon dengan ketinggian 1.579,6 m dan gunung Mahawu dengan ketinggian 1.331,0 m yang merupakan hulu dari 12 sungai besar dengan 7 danau. Kepulauan Sangihe yakni Karangetang dengan ketinggian 1.320,0 m, Ruang dengan ketinggian 714,0 m, Banuawuhu 0,0 m, Submarin 0,0 m, dan gunung Awu dengan ketinggian 1.78,0 m. Serta Kota Bitung dengan gunung Tangkoko dengan ketinggian 1.149 m. Terdapat 30 sungai yang tersebar provinsi Sulawesi Utara meliputi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa sementara danau berjumlah 17 buah yang terletak di 3 wilayah ini yakni Kab. Bolang Mongondow, Minahasa dan Sangihe Talaud.

## **B. Situasi Sosiologis umat beragama di Sumut dan Sulut**

### **B.1. Demografi Umat Beragama dan etnisitas**

Adapun pemeluk agama di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 dari komposisinya adalah pemeluk agama Islam sejumlah 10.064.383 jiwa, pemeluk agama Protestan 4.083.712, pemeluk agama Katolik 1.102.948 jiwa, pemeluk agama Hindu 16.076 jiwa, pemeluk agama Budha 389.243 jiwa dan pemeluk agama Konghucu 738 jiwa.

Dari sisi etnisitas di Sumatera Utara sulit sekali mendapatkan data penduduk berbasis etnisitas. BPS sendiri merilis data hasil sensus pada tahun 2010. Untuk itu peneliti juga menggunakan data tersebut untuk mendiservikasi persentase penduduk provinsi Sumatera Utara berdasarkan etnisitas. Hasil sensus 2010 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sebanyak 44,75% etnis di Sumatera Utara adalah suku Batak. Terdiri dari sebesar 25,62% Tapanuli/Toba, 11,27% Mandailing, 5,09% Karo, 2,04% Simalungun, dan 0,73% Pakpak. Selain suku Batak, penduduk Sumatera Utara juga banyak berasal dari Pulau Jawa, yaitu Betawi, Banten, Sunda, Jawa, dan Madura. Persentase dari etnis ini mencapai 33,4%. Kemudian, sebesar 6,36% berasal dari etnis Nias, 5,86% Melayu, dan 2,71% Tionghoa. Ada juga 2,66% penduduk yang merupakan suku Minang dan 0,97% Aceh. Sementara itu, sebesar 3,29% di luar etnis yang telah disebutkan diatas.<sup>64</sup>

Sementara penduduk Sulawesi Utara berdasarkan agama diketahui bahwa sejak dulu dikenal kebanyakan menganut Kristen, dan mereka umumnya penduduk asli yang berasal dari beberapa etnis, antara lain, Minahasa, Tombulu, dan Sangir. Menurut beberapa informan, dari beragam etnis di Sulawesi Utara, Minahasa

---

<sup>64</sup> Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, dipublikasikan pada tahun 2011.

merupakan etnis terbanyak, yakni sekitar 70 persen, dan tersebar di semua kabupaten. Sisanya dihuni etnis pendatang seperti Gorontalo, Bugis, Makassar, Jawa, Arab, Tionghoa, dan Batak. Jumlah etnis di Sulawesi Utara menurut penuturan Sekretaris Kesbangpol Sulut berjumlah 35 etnis, termasuk Islam tua dan sade.

Sangat sulit mendapat informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan agama di Sulawesi Utara. Badan Pusat Statistik (BPS), yang selama ini selalu mencantumkan penduduk berdasarkan agama, kini sudah tidak mencantumkan lagi. Di dalam BPS “Sulawesi Utara Dalam Angka 2022” tidak ada tabel jumlah penduduk berdasarkan agama. Selama ini, pihak BPS hanya menerima data-data dari kemenag, dan kemudian memasukkan data-data tersebut ke dalam kolom Sulawesi Utara dalam Angka.

Setelah 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai medium tidak lagi mencantumkan data-data pemeluk agama. Sebagian pihak berasumsi ada kekhawatiran dari pemerintah setempat untuk mencantumkan jumlah penganut agama sejak 2008. Terlebih, sejak adanya tren kenaikan penduduk beragama Islam yang hampir seimbang dengan penduduk Kristen, sehingga demi menjaga status quo sebagai kota Kristen, pemerintah setempat tidak lagi mencantumkan jumlah penduduk berdasarkan agama. Hal ini juga berkaitan erat dengan persoalan penguasaan lahan politik atau representasi identitas. Jadi, ada semacam kekhawatiran kota ini akan

dipimpin oleh orang muslim, yang dikhawatirkan dapat memicu lahirnya konflik sosial<sup>65</sup>.

Selain itu, tidak dicantumkannya data-data jumlah pemeluk agama di BPS, disebabkan oleh adanya sikap saling mengklaim di antara umat Islam dan Kristen di Manado. Persoalan ini kemudian menjadi politis, lantaran berebut posisi siapa yang menempati mayoritas dan minoritas. Orang Islam mengaku jumlah mereka kini berimbang atau hampir berimbang dengan umat Kristen di Manado. Sebaliknya, orang Kristen di Manado pun menampik, jumlah mereka tetap yang terbanyak. Ini dapat dilihat dengan jabatan “kosong satu” di provinsi (gubernur) dan kota (walikota) yang hingga kini selalu dipegang oleh orang Kristen, atau istilah Sumampouw<sup>66</sup>, gubernur dan walikota selalu didominasi PKK (Pasangan Kristen-Kristen) ketimbang PKI (Pasangan Kristen Islam).

Berhubung tidak memperoleh data terbaru terkait jumlah penduduk berdasarkan agama di Manado, peneliti menggunakan data pada tahun 2018, dimana berdasarkan komposisinya pemeluk agama Islam di Sulawesi Utara berjumlah 857.997 jiwa, pemeluk agama protestan berjumlah 1.703.824 jiwa, pemeluk agama Katolik berjumlah 162.657 jiwa, pemeluk agama Hindu berjumlah 16.386, pemeluk agama Budha berjumlah 4.391 jiwa dan pemeluk Konghucu berjumlah 200 jiwa. Menariknya tren pemeluk agama Hindu menurut data BPS tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan sangat besar, dimana pada tahun 2016 pemeluk agama

---

<sup>65</sup> Sumampouw dalam Irfan, M. Syuhudi. 2015. Penyuluh dan Pengelolaan Kerukunan di Kota Manado. (Laporan Penelitian) Makassar, Balai Litbang Agama Makassar.hal.117

<sup>66</sup> Ibid. hal.116

Hindu berjumlah 22.875 jiwa atau terjadi penurunan hampir 6.000 jiwa.<sup>67</sup>

## B.2. Dinamika Hubungan Umat Beragama di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara

Hubungan umat beragama di Sumatera Utara menurut Dr. Arifinsyah adalah sesuatu yang sudah biasa berbeda. Konflik itu hanya keniscayaan, hanya bagaimana mengelolanya sehingga tidak menjadi konflik kekerasan.

Menurut Drs. Abd Amri Siregar, M.Ag Kakanwil Kemenag Sumatera Utara, Dinamika hubungan umat beragama di Sumatera Utara di topang oleh adat di masyarakat.

“ Adat membantu hubungan antar umat beragama terjaga. Sehingga karena diikat adat konflik antar umat beragama dapat dielakkan. Hanya perkembangan pasca 2019, dimana mengentalnya politik identitas maka mau tidak mau sedikit dari kita Islam sedikit mengganggu juga, walau tidak terlalu. Terkait hubungan dengan pemerintah malah dari yang Islam banyak protes dan menolak. Misalnya pertemuan di polda terkait program nataru. Itu yang dibicarakan bagaimana natal di masa pandemic. Dari pihak Kristian mendukung sepenuhnya langkah pemerintah. Sementara kita banyak kurang strategis dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Ini mungkin persoalan historis dimana dulu pemerintahan Belanda dimana kalau persoalan umat Islam sulit dikabulkan. Sehingga terbawa sampai saat ini”.<sup>68</sup>

Menurut Drs Amri, persoalan antar umat beragama yang dilaporkan pada kemenag selalu faktor sosial, bukan konflik agama.

---

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik, Sulawesi Utara dalam Angka 2018

<sup>68</sup> Wawancara Kakanwil Kemenag Prov. Sumatera Utara, 6 Agustus 2022

Misalnya ada perempuan dan laki-laki pacaran kemudian putus, itu kemudian dibawa ke persoalan agama.

Menurut Pendeta Lucky dari Gereja Masehi Injil Minahasa (GMIM) yang juga merupakan ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) provinsi Sulawesi Utara, situasi Sosiologis antar umat beragama sangat berhubungan dengan sejarah agama di Sulawesi Utara

“Situasi umat beragama di Sulawesi Utara ini tidak terpisahkan dari sejarah. Bahwa harus dicatat perbedaan-perbedaan yang terjadi di Sulawesi Utara sejak tahun 1800 sudah pernah terjadi, ketika Kyai Mojo bertemu dengan tokoh-tokoh agama Kristen, dan Kyai Mojo bisa mendapatkan lahan di daerah kita Minahasa ini. Pada saat itu umat Kristen di Minahasa sudah mencapai 80 ribuan”<sup>69</sup>.

Pengikut kyai Mojo kemudian kawin mengawin dengan penduduk Minahasa sehingga muncullah kampung Jaton, atau Jawa Tomohon.

Pada awalnya masyarakat Minahasa yang kemudian menjadi Sulawesi Utara menganut sebagai ahli furu, atau animisme. Kemudian masuk Riddle dan Schwarz<sup>70</sup>. Menurut pendeta Lucky

“Riddle tidak masuk dengan ajaran Kristen di awalnya, tetapi dengan pendidikan, cara menanam dan lain-lain. Maka pada tahun 1831 berdiri sekolah-sekolah seperti cara membaca. Pada saat itu juga berdiri Misses School, sekolah untuk kaum wanita sehingga berkembang gender dari dulu di

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara Pendeta Lucky, 22 Agustus 2022

<sup>70</sup> Johann Friedrich Riedel dan Johann Göttlieb Schwarz dikenal sebagai tokoh zending yang melakukan pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Minahasa diawali pada masyarakat Tondano. Pada 12 Juni 1831 kedua warga Jerman itu di tanah Toar Lumimuut, dan hari itu dipakai sebagai peringatan Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Minahasa. Riedel tiba dan menetap di Tondano pada tanggal 14 Oktober 1831

Minahasa. Itu kemudian yang mengembangkan guru-guru yang kemudian menyebar di Sumatera dan di Kalimantan”.<sup>71</sup>

GMIM sekitar 73% berada di Sulawesi Utara, namun tetap berdampingan dengan agama lain.

Dalam relasi antar agama dan politik, menurut pendeta Lucky, Kota Manado tidak lagi menjadikan agama menjadi faktor dominan dalam pemilihan pimpinan daerah, namun lebih pada ketokohan dari calon pimpinan daerah itu. Apalagi calon memiliki ekonomi yang baik, maka lebih dipercaya dan lebih baik. Misalnya walikota Manado misalnya dari Konghucu.

Namun diakui politik identitas masih berjalan dalam konteks etnisitas, sementara basis agama tidak begitu menjadi concern

“ada pendatang Gorontalo di desa, kemudian berkembang. Beliau kemudian mau maju jadi kepala desa. Namun ditolak ramai-ramai oleh masyarakat setempat orang Minahasa...karena masyarakat pendatang...tapi itu sudah diselesaikan juga oleh FKUB”

Di Sulut sebagian besar tokoh budaya juga tokoh agama. Di gereja ada namanya Penatua.”Kalau memilih penatua itu bisa ribut lagi. Banyak saingannya. Penatua di pilih. Contoh GMIM. Satu gereja di bawah satu wilayah. Satu wilayah bisa ada sekitar 10 jemaat. Satu jemaat ada 20-25 kolom. Satu kolom 35 – 40 KK. Bikin pemilihan satu diaken dan satu pinatua. Itu organisasi gereja. Dari jemaat itu memiliki wilayah. Wilayah itu bisa 10 gereja. Satu

---

<sup>71</sup> Opcit. Wawancara Pendeta Lucky, 22 Agustus 2022

wilayah itu pimpinannya Sinode. GMIM anggota ke 137 dari WCC (World Council of Church)

“Dalam internal gereja musuh-musuh juga banyak. Itu banyak persoalan perut. Banyak pendeta-pendeta musiman. Dalam Islam juga ada, kalau sudah pegang tangannya waah sudah. Kalau ada 10 KK sudah buat gereja baru. Karena kalau sudah 10 KK jemaat kan harus menanggung pendetanya. Apalagi dijanjikan selalu surga”

Bapak Beri seorang cendikiawan katolik di Manado, menyebutkan bahwa ciri pemimpin politik atau orang yang ingin menjadi kepala daerah harus merangkum semua agama yang ada. Silaturahmi semua agama dan yang mampu mengayomi semua agama biasanya yang akan terpilih. Pemimpin politik itu selalu menggunakan cara merawat kontestan dengan menggandeng tokoh-tokoh agama melalui program-programnya.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara Bapak Beri, cendikiawan Katolik Sulawesi Utara, 22 Agustus 2022

## **BAB V**

### **PERBANDINGAN KONFLIK DI SUMATERA UTARA DAN SULAWESI UTARA**

#### **A. Peta konflik di Sumut dan Sulut**

Konflik di provinsi Sumatera Utara diyakini sebagian banyak tokoh agama bukan merupakan konflik agama melainkan konflik sumber daya, konflik penguasaan ruang public yang dipicu melalui sensitivitas agama.

Dr Arifinsyah menyebutkan dalam penelitiannya bahwa, “konflik politisasi agama yang tinggi sebesar 16% di provinsi Sumatera Utara. Agama menjadi pemicu konflik ada benarnya. Tanjung Balai misalnya tahun 2016. Kasusnya dimulai tahun 2010. Bukan persoalan antar agama, namun persoalan sumber daya ; ekonomi, alam, penguasaan wilayah wilayah ekonomi. Kemudian 2010 – 2016 terjadi pembiaran oleh pemerintah menjadi liar. Termasuk di Binjai baru dan Taput di Pahae Jae, masjid almunawaroh. Itu bukan konflik agama namun politisasi. Mendekati pemilu akan bertambah banyak itu”.<sup>73</sup>

Lebih lanjut Dr. Arifin menyebutkan bahwa konflik sumber daya alam sebesar 10%, yang diperebutkan beda agama seperti kasus di mandailing Natal. Beliau juga menyebutkan ada lebih 40 kasus konflik di Sumut yang belum selesai sampai 2022. Misalnya

---

<sup>73</sup> Disampaikan Dr. Arifinsyah, MA saat sebagai pemantik FGD di hotel Inna Medan, 2 Agustus 2022

juga kasus di Silambo dekat Medan amblas belum selesai konflik lahan antar etnis batak yang beragama Kristen dengan etnis Melayu yang beragama Islam. Menurutny Pada saat dimediasi selesai, namun begitu mediator pulang, konflik berlangsung lagi.

Demikian pula Konflik di Tanjung Balai pada Juli 2016 yang disebabkan oleh kesalahpahaman pada suara toa masjid. Protes seorang wanita Tionghoa pada suara Toa masjid, yang kemudian diartikulasikan sebagai pelarangan ini kemudian mendapat reaksi dari masyarakat Islam. Masyarakat Tanjung balai dan dari luar kota Tanjung Balai kemudian terkonsentrasi berdasarkan berita di facebook dan whatsapp. Peristiwa yang awalnya berusaha dimediasi menjadi kekerasan pembakaran rumah keluarga wanita Tionghoa tersebut, 4 vihara, 8 klenteng, dan 2 yayasan sosial di sekitar kota Tanjung Balai. Masyarakat Tionghoa yang berada di kota Tanjung Balai pada saat itu tidak ada yang keluar rumah dan beraktivitas, bahkan sebagian mengungsi ke Medan atau kota lainnya. Menariknya bahwa masyarakat membakar rumah ibadah yang bukan milik agama individu yang memprotes namun agama lain, dimana klenteng tempat ibadah orang konghucu juga dibakar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat umum sebagian besar tidak memahami agama sendiri maupun agama yang dianut orang lain.

Selain itu ada beberapa konflik skala kecil yang berpusat pada persoalan rumah ibadah, praktek ritual keagamaan, dan ternak dan pakter tuak. Terjadinya beberapa konflik tersebut disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

Pertama, pendirian Rumah ibadah, yaitu pendirian rumah ibadah kaum minoritas di tengah kaum mayoritas. Beberapa kasus dapat

disampaikan ialah seperti pendirian vihara/pembuatan patung di daerah mayoritas Muslim, seperti yang terjadi dalam kasus Tanjung Balai. Kemudian pendirian gereja di daerah mayoritas Muslim, seperti yang terjadi di Kota Binjai. Selanjutnya, pendirian masjid di daerah yang mayoritas Kristiani, seperti yang terjadi di Kecamatan Pahae pada tahun 2013. Penolakan pemindahan lokasi Masjid Al Munawar dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae dikoordinasi oleh Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian (AMNPK). Berdasarkan penelitian Yusuf Arsy (2014), alasan penolakan tersebut pertama lokasi masjid dekat dengan gereja, dari batas tanah lokasi sekitar 50 m. sehingga mayoritas pemeluk Kristen ke gereja harus melalui jalan samping calon lokasi masjid, kedua mayoritas penduduk Dusun Aek Bulu dan Dusun Siri-ria pemeluk Kristen dan ketiga panitia pembangunan Masjid Al-Munawar tidak menghargai Natuatua desa, keempat, faktor kepatutan dan kelayakan, dimana pembangunan Masjid Al-Munawar tidak patut dibangun di lokasi lingkungan sawah orang Kristen karena mematikan usaha ekonomi orang Kristen, seperti tidak bisa beternak dan menjual daging babi di sekitar masjid<sup>74</sup>.

Dr. Maratua ketua MUI Sumatera Utara menjelaskan:

“Konflik yang selalu menjadi masalah di Sumatera Utara ini adalah pendirina rumah ibadah. Itu sebenarnya ada aturannya. Persyaratan mendirikan rumah ibadah itu harus ada 90 kk anggotanya. Itu selalu yang menjadi masalah Konflik yang terbaru ini adalah pendirian rumah ibadah di Gaharu Lima (Medan). Itu ada mau pendirian gereja di tengah-tengah perkampungan muslim. Sudah ada 60 orang termasuk

---

<sup>74</sup> M. Yusuf Arsy, 2014, Miskomunikasi dan Rubuhnya Sendi Harmoni Antar Kristen-Islam dalam Pembangunan Masjid Al- unawar Nahornop Marsada, Kabupaten Tapanuli Utara, journal Harmoni, hal. 58-59.

muslim yang menyetujui, namun ada yang keberatan sehingga konflik ini berakibat kepada konflik antar umat Islam, karena ada umat Islam itu yang menyetujui. Biasanya ada masalah kepentingan. Yang fatal selama saya di FKUB ada dua, pertama pelebaran masjid di Sarula. Ijin dari FKUB dan kemenag sudah keluar, tapi dari masyarakat menolak. Sampai sekarang pelebaran tersebut tidak jadi. Dan menurut aturannya masjid itu masjid enam kampung. Demikian pula di Binjai, itu gereja, sebelum tahun 2000. Gereja sudah mendapat rekomendasi dari umat islam. Gerejanya di tengah sawah. Ternyata ada protes dari masyarakat. Ada ormas-ormas yang menolak. Waktu itu walikotanya Umri. Sampai masalahnya ke Ephorus. Ephorus mengatakan bukan gereja kita itu pak”.<sup>75</sup>

Menurut Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Pak Alfian, konflik antar umat beragama di Sumatera Utara sangat sedikit. Konflik kebanyakan masalah pertanahan, HGU, PTPN<sup>76</sup>. Penyebab-penyebab konflik antar atau inter umat beragama di provinsi Sumatera Utara dari berbagai sumber saat wawancara dan Focus group discussion adalah:

Pertama, Pembangunan perumahan atau pusat bisnis yang membongkar rumah ibadah/masjid, seperti pembongkaran masjid Amal Silaturrahim di Sukaramai, masjid Nurul Hidayah di MMTC, dan lain-lain. Faktor ini hanya terjadi terhadap masjid, karena tidak ada rumah ibadah selain masjid yang digusur/dibongkar hanya karena membangun perumahan atau pusat bisnis.

Kedua, Pengaruh media sosial seperti video yang secara bebas memasuki kehidupan masyarakat, termasuk informasi-informasi yang sifatnya propokatif. Melalui medsos ini disampaikan

---

<sup>75</sup> Wawancara Dr. Maratua Simanjuntak, 5 Agustus 2022

<sup>76</sup> Wawancara Kesbangpol Prov. Sumatera Utara, 8 Agustus 2022

secara luas adanya konflik di daerah lain, sehingga mendorong di daerah tersebut melakukan tindakan yang sama. Misalnya, penolakan masyarakat Pahae Jae terhadap pembangunan masjid, karena gereja juga ditolak oleh masyarakat di daerah lain, jelasnya di Binjai.

Ketiga, Konflik berkembang di internal agama juga terjadi di Sumatera Utara, misalnya dalam agama Kristen, terkait pembentukan sekte baru, dimana sekte baru mencari Jemaah baru. Yang tidak terjadi konflik itu di Katolik. Konflik lain menurut Dr Maratua juga misalnya di pengikut Pentakosta. Sementara konflik internen antar umat Islam ada pada pemahaman dan pengamalan agamanya. Kalau dulu menurut Dr. Maratua ketua MUI Sumut konflik antar Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun sekarang tidak ada lagi.

Keempat, konflik-konflik pemikiran madzhab-madzhab dalam Islam. Konflik pemikiran tu biasa hilang sendiri. Misalnya pemikiran Miftahul Khair. Kalau tidak selesai dipanggil oleh MUI.

Kelima Rasa takut terhadap agama lain dengan munculnya istilah islamisasi, kristenisasi, dan sebagainya. Rasa takut itu mengkristal dengan penolakan terhadap moderasi beragama.

Keenam, Penodaan agama dari seseorang atau kelompok yang dikaitkan dengan agama tertentu, lalu agama yang dinodai menganggap hal tersebut sebagai kebijakan suatu agama terhadap agama lain.

Ketujuh, Gerakan penyebaran agama yang dianggap opensif dari suatu agama, sehingga mengundang penolakan dari agama lain. Dan ditambah Kebijakan Pemerintah yang kurang berpihak semua

agama, misalnya, merelakan pembongkaran masjid hanya untuk pertimbangan pengembangan lokasi bisnis atau perumahan dari etnis tertentu.

Kedelapan, Ketidakhadiran negara pada saat terjadi perbedaan pandangan inter atau antar umat beragama yang dapat memicu konflik kekerasan

Seperti halnya di Sumatera Utara, dalam dinamika masyarakat di provinsi Sulawesi Utara juga terjadi konflik antar umat beragama. Konflik ini dalam konteks kesejarahan juga dipengaruhi oleh faktor politik dan pendomplengan, dimana agama atau komunitas agama dijadikan kenderaan atau tandem. Pendeta Lucky dalam wawancaranya mengatakan:

“Pada masa kemerdekaan, masa perjuangan, gereja sering dijadikan tandem termasuk dengan gerakan Permesta. Dulu terjadi pembakaran klenteng oleh umat muslim, konflik antar muslim dan konghucu. Ketika konflik ada provokasi pelemparan gereja, sehingga memicu kerusuhan dan pada saat itu walikota adalah muslim. Tahun 68. Maka terbentuk BKSAUA dari munculnya peristiwa itu. Maka baru muncul FKUB. BKSAUA dulu ada ditingkat Kota, karena masih Minahasa”.<sup>77</sup>

Dalam penelitian Syuhudi (2016) yang mengutip dari karya Nono dan Sumampaouw, bermunculannya kelompok identitas di Sulut dan Manado tak terlepas dari sejarah gerakan Perjuangan rakyat semesta atau Perjuangan Semesta, disingkat Permesta dari tahun 1957 sampai tahun 1961. Gerakan ini merupakan gerakan militer di Indonesia yang terkait dengan gerakan Permesta di Sumatera . Perjuangan Permesta tidak mengatasnamakan kelompok

---

<sup>77</sup> Wawancara Pendeta Lucky, 22 Agustus 2022, Manado.

identitas tertentu, serta tidak membawa nama agama atau etnis tertentu. Gaung Permesta sampai wilayah Sumatera dan Makassar dimana pusat wilayah timur adalah Manado. Beberapa tokoh Islam lokal pun ikut bergabung bersama tokoh-tokoh lain yang kebanyakan beragama Kristen. Salah satunya, tokoh islam yang terlibat adalah Kyai Haji Arifin Assegaf. Di zaman Permesta, kyai kharimastik keturunan Arab-Minahasa, Jawa, dan sangat disegani di Sulut hingga akhir hayatnya ini, sempat diangkat menjadi Kepala Staf Permesta di Maluku Utara<sup>78</sup>. Namun, gerakan Permesta sering diidentikkan sebagai gerakan orang Minahasa yang Kristen.<sup>79</sup>

Konflik yang muncul di Sulawesi Utara sebagian besar karena persoalan pendirian rumah ibadah seperti pengembangan mushalla menjadi masjid. Konflik lain adalah perebutan kekuasaan politik yang penggunaan relasi identitas etnis-agama-sosial status.

Situasi nasional dan konflik pada wilayah di luar Sulawesi Utara juga menjadi faktor deteminan meningkatnya eskalasi kecurigaan, dan pergulatan perbincangan serta pemikiran terkait relasi antar agama dan etnisitas di Sulawesi Utara.

Staf Kemenag kantor wilayah Sulawesi Utara menyatakan:”kasus pesantren yang boarding school yang Jawa Timur, yang kyai nya 13 anak itu...itukan jadi sorotan juga disini”.<sup>80</sup>Kemudian pada awal tahun 2000-an misalnya, di wilayah Minahasa, sejumlah aktivis dan intelektual serta tokoh-tokoh

---

<sup>78</sup> Sumampouw, Nono S. A., *Menjadi Manado*, Torang Samua Basudara, Sabla Aer, dan Pembentukan Identitas Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hal.62

<sup>79</sup> Ibid. hal.95

<sup>80</sup> Wawancara Staff Kemenag RI kantor wilayah Sulut, 22 Agustus 2022. Pak Ramli juga merupakan sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Utara.

pemuda berembuk untuk menyikapi situasi akibat kerusuhan Ambon dan Poso, lalu diperuncing dengan upaya-upaya kelompok Islamis memasukan Syariat Islam dalam konstitusi.

Buah dari rembukan para tokoh Minahasa tersebut adalah dilakukannya Kongres Minahasa Raya (KMR) 1 dan 2 pada tahun 2000 dan 2001. KMR 1 yang dilaksanakan di Tomohon pada tanggal 5 Agustus 2000 menghasilkan naskah Deklarasi KMR I, dimana paragraph pertama dari pembukaan tersebut merumuskan kuat terkait penguatan identitas orang Minahasa”

Pengantar naskah deklarasi tersebut menyebut apa yang dirumuskan sebagai identitas Minahasa:

“ . . Telah datang dan berkumpul di Bukit Inspirasi Tomohon pada hari Sabtu, 5 Agustus 2000, orang-orang Minahasa dan keturunannya dari berbagai penjuru di Tanah Toar Lumimuut (Kabupaten Minahasa, Kota Manado dan Kota Bitung) maupun di luar Tanah Minahasa, guna berdiskusi, menggagas serta merumuskan kesepakatan luhur untuk mempertegas komitmen ke-Minahasa-an, dan merumuskan kesepakatan menyongsong masa depan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya rakyat Minahasa”.<sup>81</sup>

Penelitian Siti Tarawiyah dkk. pada tahun 2018 menunjukkan bahwa KMR 1 menjadi momentum berdirinya ormas Brigade Manguni, lalu disusul ormas Milisi Waraney, Militia Christi dan Legium Christum, yang merepresentasi politik identitas, yaitu adat Minahasa dan agama Kristen. Puluhan ormas kemudian

---

<sup>81</sup> Deklarasi KMR I dikutip dari <https://www.fajarm Manado.com/2017/05/08/kongres-minahasa-roya-kmr-kembali-digaungkan/>

menyusul berdiri. Pada tahun 2012, di Tomohon berdiri ormas Minaesaan Tombulu Sulut (MTS) dan pada 29 Mei 2015 Komisi Pria/Kaum Bapa GMIM mendeklarasikan ormas bernama Panji Yosua. Ormas Minaesaan Tombulu Sulut (selanjutnya MTS) berdiri pada tahun 2010. Kata ‘minaesaan’ diambil dari bahasa Minahasa yang berarti ‘persatuan’. Sementara ‘Tombulu’ menunjuk pada satu wilayah adat di Minahasa yang diidentifikasi berdasarkan bahasa.<sup>82</sup>

Pada praktiknya ormas-ormas yang terbentuk ini termasuk MTS melakukan beberapa demonstrasi. Pada tahun 2015 sejumlah pemimpin ormas, termasuk MTS, melakukan konsolidasi dan membentuk satu aliansi yang mereka namakan Aliansi Masyarakat Kawanua Peduli Toleransi (Makapetor). Salah satu aktivitas aliansi ini adalah menolak renovasi Masjid Al-Khairiyah di lahan eks Kampung Texas di pusat Kota Manado. Masjid-Al Khairiyah terletak di pusat Kota Manado, yaitu sebuah lokasi yang populer disebut ‘Kampung Texas’. Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an sebagai tempat beribadah dari warga Muslim yang kebanyakan pedagang di pusat kota itu. Sebagaimana dikutip dari pernyataan tokoh aliansi tersebut, aliansi menuntut pemerintah Kota Manado merealisasikan kebijakannya membangun Taman Wisata Religi. Pemerintah kota memang telah mengeluarkan kebijakan tata kota untuk mendesain lokasi itu menjadi taman wisata religi yaitu dengan membangun miniature rumah-rumah ibadah masing-masing agama.

---

<sup>82</sup> Erni Puji Utami dkk, 2018, Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Konstruksi Identitas dan Eksklusi Sosial, CRCS, Yogyakarta, hal.112 - 114

Perubahan demografi wilayah pada konteks Sulawesi Utara menjadi penyebab konflik yang diikuti dengan perebutan wilayah ekonomi serta berkelindan dengan etnisitas. Keterancaman dalam identitas dan kuasa ekonomi juga menguatkan politik identitas yang mendorong konflik terjadi. “Kampung Texas’ misalnya adalah pemukiman padat penduduk yang penghuninya kebanyakan adalah orang-orang Gorontalo-Muslim yang sehari-hari pekerjaannya adalah pedagang kaki lima di “Pasar 45”. Kedatangan orang-orang Gorontalo memang sudah sejak zaman kolonial, namun nanti membanjir di masa Rauf Mo’o, seorang Muslim yang berasal dari Gorontalo menjabat Walikota Manado pada tahun 1966 sampai 1971. Dengan demikian, dalam hal perdagangan di pusat Kota Manado, relatif dikuasai oleh para pedagang Gorontalo.

Namun pada tahun 2000 Gorontalo yang sebelumnya adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Utara menjadi provinsi sendiri, dimana 97% penduduknya adalah muslim. Maka perubahan tersebut menyebabkan komposisi demografi di Sulawesi Utara menjadi berubah dimana persentase agama Kristen menjadi sangat dominan yang juga linier dengan dominasi etnis Minahasa, dan berimplikasi pada dominasi politik lokal dan pengukuhan identitas sosial. Sejak masa itu pula orang-orang Gorontalo di Kota Manado, oleh orang-orang Minahasa dengan mudah diberi lebel ‘pendatang’ karena daerah asalnya sudah memisahkan diri dari provinsi Sulut.

Hal lain, munculnya sejumlah politisi berdarah Tionghoa menjadi kegelisahan tersendiri. Situasi ini dikaitkan dengan kiprah masyarakat Tionghoa sejak orde baru di bidang ekonomi. Stereotype pengusaha ekonomi menjadi pemicu kekhawatiran turunan

Tionghoa berkiprah pada panggung politik Sulawesi Utara. Pada sebagian masyarakat Manado kemunculan politikus dari etnis Tionghoa adalah wujud keberagaman. Namun pada sisi lain sebagian masyarakat menganggap penguasaan “pendatang” merupakan ancaman. Dalam kuasa identitas orang Minahasa diketahui mendominasi instansi pemerintahan dan politik di Sulut. Di tingkat provinsi, Gubernur Sulut dipegang oleh orang Minahasa. Dalam bidang pemerintahan dan politik setelah reformasi bergulir, orang Minahasa selalu menempati posisi superior. Mereka tak ingin menjadi nomor dua di daerah sendiri. Dari sinilah kita mulai memasuki dan menyelami peranan beberapa kelompok identitas Minahasa. Kelompok identitas bisa dijadikan “pintu” untuk menembus batas-batas lapisan struktural, dan juga mendekati atau didekati penguasa. Namun belakangan konstruksi identitas etnis ini berubah dengan bertambahnya faktor determinan lain dalam penguasaan politik adalah faktor kekuasaan ekonomi, yang notabene dikuasai oleh etnis Tionghoa. Ini dikuatkan walikota Manado tidak lagi diduduki oleh orang Minahasa, namun dijabat oleh seorang Konghucu turunan Tionghoa, walau tetap dalam barisan partai politik yang sama dengan mayoritas etnis Minahasa.

Tokoh FKUB Manado menyebutkan,” walau walikota kita Konghucu, Chinese, tapi beliau sangat peduli pada tokoh-tokoh agama. Bahkan bantuan pada tempat-tempat ibadah sangat luar biasa. Saya baru melaksanakan musyarawah MUI Manado, kita

dibantu konsumsi 150 kepala, catering. Kebetulan saya ketua Panitianya”<sup>83</sup>

Namun demikian perebutan wilayah ekonomi dalam bungkus identitas dan sekaligus pengukuhan kuasa identitas etnis yang berkait dengan agama terus terjadi di bumi Sulawesi Utara. Pada tahun 2005 walikota terpilih adalah, seorang Minahasa-Kristen dan wakil walikota seorang Islam dari komunitas Kampung Jawa Tondano. Pada masa pemerintahan mereka, maka dibuatlah kebijakan relokasi para PKL di Pasar 45. Penolakan dilakukan oleh para PKL, tapi tidak dapat membatalkan kebijakan tersebut. Sementara, di kalangan tertentu orang-orang Minahasa di pegunungan meski secara tidak langsung tapi mendukung relokasi tersebut dengan alasan “para pendatang sudah menguasai Pasar 45. Situasi ini menunjukkan walau wakil walikota adalah seorang muslim, namun kebijakan yang diambil dan dikukuhkan adalah adaptif minoritas pada keputusan mayoritas.

Termasuk yang direlokasi adalah warga penghuni kampung Texas, Kel. Wenang Utara, Kec. Wenang tersebut. Tahun 2007 Pemerintah Kota Manado merelokasi warga di situ, baik Islam maupun Kristen dengan kompensasi tanah untuk membangun rumah di wilayah Kecamatan Singkil. Menyusul kemudian, tahun 2009, Pemerintah Kota Manado menyusun Perencanaan Teknis atau Detail Engineering Design (DED) Revitalisasi Kawasan Eks Kampung Texas, dengan maksud menghadirkan kawasan pusat Kota Manado sebagai tujuan wisata, dengan menonjolkan setiap bagian kawasan

---

<sup>83</sup> Wawancara Pengurus FKUB Manado, pengurus MUI Manado dan juga pengurus Muhammadiyah

melalui keunikan dan karakternya masing-masing, disatupadukan untuk menciptakan secara harmonis aktivitas pariwisata, ekonomi, dan sosial budaya. Namun secara bersamaan Masjid Al-khairiyah yang sudah ada sejak tahun 1960-an, dan pada lokasi yang sama, ingin direnovasi oleh jemaahnya. Renovasi dimulai tahun 2013 dan terus berlangsung sampai tahun 2015. Maka kumpulan ormas dalam Aliansi Makapetor, melakukan serangkaian aksi penolakan renovasi masjid. Tuntutan aliansi adalah agar pemerintah melaksanakan rencananya untuk menjadikan kawasan itu sebagai taman religi. Karena dengan demikian maka baru terjadi keadilan dalam hal pembagian ruang untuk semua agama. “Yang kami tuntut adalah keadilan. Sebab sekarang ini sebagian besar tempat itu sudah dikuasai oleh mereka, pinorongan.”<sup>84</sup>

Menarik karena tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok aliansi ormas mengatasnamakan toleransi untuk semua agama. Pada tindakan *confronting* aliansi ormas juga dapat dilihat historical context, perubahan demografi agama dan etnisitas, perebutan kuasa ruang public yang bersinggungan dengan kebijakan pemerintah yang absen konsiderans situasi sosiologis keberagaman.

*Claiming* kuasa etnisitas tempatan pada ruang public dan ruang ekonomi mendominasi pemicu konflik di Sulawesi Utara.

Di kalangan ormas, dikembangkan pemikiran bahwa Kota Manado yang secara adat adalah bagian dari Tanah Minahasa harus

---

<sup>84</sup> Pinorongan adalah kata dari bahasa Minahasa yang berarti penutup kepala. Dalam konteks sebagai istilah menyebut secara tidak langsung umat Muslim maksudnya menunjuk kepada mereka yang memakai penutup kepala kopiah untuk laki-laki dan jilbab untuk perempuan. Dikutip dari penelitian yang dilakukan CRCS pada tahun 2018

diklaim kembali, termasuk menggunakan pendekatan artefak maupun pertarungan politik. Bagi MTS, komitmen untuk menjaga Tanah Minahasa, termasuk Kota Manado ditunjukkan pada salah satu unsur dalam logo organisasi mereka, yaitu lima bintang berwarna kuning yang diberi arti lima walak di Tombulu, yaitu Kakaskaesen, Tou Muung, Sarongsong Tombariri dan Tou Ares. Kota Manado dalam kisah yang diturunkan turun-temurun dan didukung oleh berapa artefak, diyakini bagian dari walak Tou Ares<sup>85</sup>.



Gambar 5.1.: Lambang MTS

Sementara pada sisi lain kalangan kelompok-kelompok Muslim di Kota Manado, menuntut pemerataan dalam hal penempatan pejabat Muslim di posisi tertentu. Masyarakat muslim mengkritik pemerintah kota dalam hal penempatan pejabat di jajaran

---

<sup>85</sup> <https://nchrist09.wordpress.com/2013/03/02/arti-dari-pada-simbol-atau-lambang-organisasi-minaesaan-tombulu-sulut/>

pemerintah kota yang tidak memperhatikan faktor keberadaan mereka sebagai warga Manado yang beragama Islam. Mereka menyebut kurangnya pejabat eselon yang menduduki jabatan-jabatan penting, lalu kepala kelurahan dan camat yang hanya sedikit dari kalangan mereka. Tuntutan pengakuan identitas dalam jabatan public ini juga disuarakan oleh cendekiawan agama katolik,

“ketimpangan keterwakilan agama dalam pemerintahan dan belum ada aksi nyata tokoh-tokoh agama “Program pemerintah seharusnya lebih demokratis mengakomodir semua agama. Sehingga semua orang merasa terwakili. Di dewan memang cukup tapi tidak dipemerintahan...saat ini Buddha misalnya tidak diakomodir dalam pemerintahan...pemimpinnya Konghucu...didominasi oleh GMIM, ya itu karena karir dari bawah. Saat ini gambarannya tidak mau tahu tentang agama, yang penting orang yang berjuang dengan saya (pimpinan politik) yang mendapat.”<sup>86</sup>

MTS juga bersama-sama dengan ormas-ormas lain menolak pendirian Masjid Asy-Syuhada Kompleks Aerujang, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016. Sebelumnya di tahun 2013, Kota Bitung juga terdapat masalah pembangunan Masjid Raya di Girian. Kota Bitung adalah kota pelabuhan yang relatif baru berbeda dengan pelabuhan Manado dan Kema.

Pelabuhan Bitung berkembang pasca Permesta, yaitu akhir tahun 1960-an. Maka, sejak saat itu Kota Bitung makin ramai didatangi oleh orang-orang dari berbagai etnis dan agama. Orang-orang Sangihe banyak terdapat di sana, lalu orang-orang Minahasa, Bugis, Gorontalo dan Tionghoa. Seperti di Kota Manado, orang-

---

<sup>86</sup> Wawancara Pak Beri cendekiawan katolik Manado, 22 Agustus 2022

orang Gorontalo dan Bugis kebanyakan berkonsentrasi pada perdagangan di sejumlah pasar di kota itu. Tahun 2013 beredar kabar bahwa di Kota Bitung telah muncul simpatisan Front Pembela Islam (FPI) dan akan segera mendeklarasikan diri di kota itu. Berita tersebut memprovokasi ormas-ormas untuk bersatu dan menyatakan sikap menolak. Kota Bitung kemudian menjadi konsentrasi dari ormas-ormas adat. Ormas-ormas adat Minahasa yang terus berkembang gelisah dengan perkembangan demografis yang terjadi yaitu kehadiran kelompok yang diidentifikasi sebagai ‘pendatang’ dan ancaman ormas-ormas intoleran Islam yang diidentifikasi sudah ada di Kota Bitung. Sebutan ‘pendatang’ umumnya menunjuk pada orang-orang Islam dari daerah lain. Dengan demikian, klaim bahwa Kota Bitung adalah bagian dari Tanah Minahasa, terutama Tonsea menjadi agenda kampanye kebanyakan ormas. Beberapa ormas tersebut kemudian membentuk satu presidium ormas yang mereka beri nama Esa Keter (Bhs. Minahasa yang berarti ‘satu kekuatan’). Kehadiran Esa Keter adalah untuk menyatukan kekuatan ormas-ormas adat yang ada Kota Bitung, tujuannya antara lain untuk menegakkan eksistensi adat dan budaya Minahasa di Kota Bitung dan mendesak pemerintah kota untuk menetapkan beberapa desa sebagai desa adat melalui Perda Adat. Menariknya Esa Keter juga membentuk forum kebangsaan yang nantinya akan melibatkan beberapa organisasi Islam yang mereka identifikasi memiliki ideologi nasionalis, yaitu Nadhalatul Ulama, Muhamadiyah dan Sarekat Islam. Ini menunjukkan bahwa proses konstruksi sosial melokalkan orang tempatan dan “pendatang” dengan framing yang sangat jelas berbasis etnis dan agama di lakukan di Sulawesi Utara.

Konstruksi sosial yang dikemukakan Luckman dan Berger ini melalui proses objectivikasi dari akar budaya Sulut yang didominasi oleh Minahasa seperti halnya diksi dan terminology, Proses eksternalisasi yang memunculkan produk berbagai ormas identitas etnistas-religius dan kemudian beraliansi antar ormas, serta proses internalisasi dimana nilai Minahasa dan tujuan ormas etnis-religius itu dipahami oleh individu-individu yang aktif di dalamnya.

Menariknya lagi bahwa konflik identitas etnis – religius ini kemudian membuat keuntungan pada kelompok kepentingan, baik kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Sehingga pertarungan kelompok kepentingan ini yang terjadi. Ralf Dahrendorf menyebutkan bahwa konflik sesungguhnya adalah perjuangan kepentingan antar kelompok untuk mendapatkan kuasa otoritas. Pada sisi lain, konflik entitas ini juga memberikan komunitas entitas yang memiliki akar sama untuk menjadi lebih solid. Namun herannya ini tidak terjadi pada antar entitas kelompok Islam di Sulawesi Utara yang cenderung terpecah antar madzhab bahkan antar pemimpin kelompok sendiri. Penelitian taufani terkait perseteruan kelompok shiah dan Suni di kalangan minoritas muslim di Manado menunjukkan kebenaran preposisi di atas.

Maka ruang-ruang kuasa *political* sosiologis, yang meski tidak berpengaruh pada relasi Kristen dan Islam, memberi kontribusi pada konsentrasi ormas-ormas yang terus meningkat di Kota Bitung, yaitu keterwakilan etnis Minahasa dan Sangihe (yang sama-sama Kristen) pada jabatan-jabatan penting, baik eksekutif/birokrasi maupun legislatif).

Cendikiawan muslim dari UIN Manado menyebutkan bahwa konstalasi politik dari Jakarta dan wilayah lain akan berpengaruh pada konstlasi hubungan antar agama dan etnisitas di Sulawesi Utara. Hal ini juga diperkuat oleh sekretaris kesbangpol Sulut. Pilkada DKI Jakarta misalnya pada akhir tahun 2016, memicu wacana MTS menegaskan kesetiaan mereka pada NKRI dengan mengkampanyekan ‘NKRI Harga Mati’ dan penolakan terhadap kelompok-kelompok intoleran. Dalam sebuah demonstrasi gabungan ormas di Kota Manado menolak ormas radikal, “Indonesia harus tetap aman. Kita tolak ormas-ormas radikal yang mengganggu keutuhan NKRI. Tolak keberadaan ormas radikal di Bumi Sulawesi Utara. Tangkap para penghina presiden Indonesia. NRI harga mati”.<sup>87</sup>

Selain konflik antar umat beragama, juga terjadi konflik antar umat beragama (Islam) dengan Pemerintah Sulawesi Utara (mayoritas Kristen), ketika kebijakan Pemerintah dianggap kurang memiliki keberpihakan kepada umat Islam. Hal ini ditandai dengan kebijakan Pemerintah yang memindahkan masjid dari suatu lokasi ke lokasi lain yang tidak ada kaitannya dengan penduduk tempatan sekitar masjid. Pemandahan ini disebabkan oleh lahan pertapakan masjid dijual oleh masyarakat ke pengembang untuk kepentingan bisnis, yaitu pembangunan mall. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh umat Islam, termasuk dengan meyakinkan pemilik lahan lama

---

<sup>87</sup> Erni Puji Utami dkk, 2018, hal. 120-121

dan yang baru atau pengembang, namun pembongkaran masjid tetap dilaksanakan<sup>88</sup>.

## **B. Pengelolaan Konflik**

Konflik yang muncul dikelola oleh masing-masing provinsi dari berbagai Namun dengan berbagai pendekatan, baik oleh Pemerintah maupun oleh organisasi lintas agama seperti BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), pembangunan masjid dapat dilanjutkan, sehingga konflik dianggap selesai. BKSAUA adalah badan yang berisi para pemimpin agama yang dibentuk berbasis kearifan masyarakat dan pemerintah Sulawesi Utara. BKSAUA muncul lebih dahulu, baru dibentuk FKUB. BKSAUA juga ada sampai ke tingkat desa.

Kita berpatok pada peraturan 3 menteri. Seperti kasus di Minahasa Utara, baru-baru itu kan hanya ada kesalahpahaman. Malah sekarang bagus masjidnya. Hampir semua agama fundamental. Yang Penting komunikasi dialog dan kesalahpahaman, dan Bupati mendukung. Tadinya masjid kecil sekarang sudah besar. Memang awal-awalnya di tolak, namun setelah dikomunikasikan dapat diterima. (Pengurus FKUB Manado)

Peran media sangat besar di Sulawesi Utara. Pada prinsip nya saat ini masih memberi keseimbangan. Memprovokasi untuk kebaikanlah saat ini. Provokasi untuk bersaing berita di media saja

---

<sup>88</sup> Penuturan Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Utara, 22 Agustus 2022

“misalnya saya bicara dengan sesama pendeta. Kemudian kami beda warna politik, namun karena berteman komunikasi tetap terjadi. Kemudian kita bicara melalui WA, tentang cara membawa salib yang terjadi kesalahpahaman, Kemudian pembicaraan itu dikirimkan ke media, dan saya disangka menista agama Katolik, sehingga saya harus klarifikasi ke keuskupan”

Kalau ada konflik FKUB yang paling di depan. Pemerintah di belakang dan itu dipolakan. FKUB kabupaten Kota selalu berkoordinasi. Pemerintah banyak membantu karena kedekatan ketua FKUB dengan gubernur, sekaligus menjadi staff khusus gubernur.

Hal lain yang menjadi kekuatan Sulawesi Utara dalam mengelola konflik adalah karakter masyarakat Sulawesi Utara yang cenderung lebih permisif dan terbuka. Dari perspektif Sejarah juga di Sulut tidak ada kesultanan atau kerajaan, sehingga masyarakat lebih egaliter. Dua faktor determinan itu membentuk masyarakat Sulut bagaimana menyelesaikan persoalan konflik. Dua faktor itu juga mempengaruhi perkembangan moderasi beragama di Sulawesi Utara.

Sulut pernah menjadi hotspot korban konflik dari Poso dan dari Ambon, kalau di picu hal itu sangat mudah terprovokasi konflik, namun tidak terjadi konflik di Sulawesi Utara. Pemerintah perannya mengawal saja, karena sebenarnya budayanya sudah mengedepankan toleransi.

Pengelolaan konflik di provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan berbagai metode. Penyelesaian konflik rumah ibadah misalnya dilakukan dengan pemerintah memfasilitasi pendirian

rumah ibadah yang bermasalah dengan menganjurkan tempat yang tepat untuk pendirian rumah ibadah sesuai dengan peraturan bersama tiga menteri. Cara penyelesaian lain adalah dengan di mediasi oleh FKUB, misalnya konflik antara Hindu dengan muslim.

Bila konflik internal umat beragama khususnya di Islam maka penyelesaiannya diselesaikan di kalangan umat itu sendiri. Umumnya adalah konflik pemikiran, namun bila tidak selesai baru diselesaikan di tingkat MUI.

Persamaan penyelesaian atau pengelolaan konflik di Sumatera Utara dan di Sulawesi Utara adalah

Pertama, sebagian besar penyelesaian konflik dilakukan secara topdown berbasis aturan dan petunjuk FKUB berada di depan bersama pemerintah. Sering sekali pendekatan ini menjadi minimal partisipasi dan absen realitas sosiologis empiris sesungguhnya. Sehingga tidak jarang model penyelesaian konflik ini mendapat tentangan di masyarakat seperti peristiwa pemindahan masjid agape Minahasa Utara, renovasi masjid di kampung texas Manado, pelebaran masjid di Sarula Tapanuli Utara, maupun pembangunan gereja di Binjai. Keputusan FKUB banyak ditentang, karena dianggap cenderung tidak memberikan keadilan bahkan meminta FKUB dibubarkan atau FKUB tidak menjadi bagian yang memberikan rekomendasi keputusan.

Kedua, penyelesaian konflik adalah dengan adaptasi kelompok minoritas pada kecenderungan pilihan kelompok mayoritas. Ini terjadi pada kecenderungan adaptasi umat muslim atau agama minoritas lain di Sulawesi Utara pada kecenderungan putusan mayoritas komunitas Kristen dan adaptasi komunitas beragama

Kristen atau agama minoritas lain pada kecenderungan putusan mayoritas muslim di beberapa kabupaten di provinsi Sumatera Utara.

## **BAB VI**

### **PERBANDINGAN GERAKAN MODERASI BERAGAMA DI SUMUT DAN SULUT**

Dalam Pendekatan Durkheim yang kemudian dikembangkan oleh David A Snow suatu gerakan sosial dilihat dari tahapan pembentukan memory/pengalaman kolektif – kesadaran kolektif – dan tindakan kolektif berikut framing pembentukannya. Framing dimaksud adalah upaya yang didisain untuk membentuk secara kolektif tiap tahapan gerakan moderasi beragama.

#### **A. Perbandingan dan persamaan Pembentukan kolektif**

##### **Memory**

Pembentukan kolektif memory di Sumatera Utara dalam gerakan moderasi beragama pertama adalah menggunakan perintah atau pengaturan pada masing-masing agama yang dalam beberapa kesempatan khususnya pertemuan terkait kerukunan atau moderasi beragama di sampaikan oleh para pemimpin agama. Namun demikian populerisasi aturan teologis ini pada lain pihak memunculkan konsepsi yang belum sepemahaman dikalangan tokoh agama sendiri terkait moderasi beragama. Pada tokoh Islam misalnya perdebatan antara moderasi beragama dalam konsep kemenag dengan konsep wasathiyah masih terus menjadi perdebatan

Dr. Arifinsyah, MA mengungkapkan:” Moderasi beragama perlu diperkuat dipertajam sehingga tidak terjadi deagamaisasi. Mengutip dari Yusuf Qordawi. Washathiyah itu bukan moderasi beragama. Moderasi tidak perlu memilih

keunggulan. Dia memilih jalan tengah. Jalan tengah tidak selalu baik. Sementara washatiyah adalah tengah yang unggul, harus memperkuat agamanya sendiri, artinya radikal, namun tidak radikalisme”<sup>89</sup>.

Dalam konsepsi teologis semangat moderasi mendapat dukungan secara normatif dari semua agama. Dalam Islam, misalnya, selain al-Qur’an surat Albaqarah/2: 143 yang dikutip di atas, terdapat juga sejumlah ayat dan hadits lain, seperti al-Qur’an surat al-Mumtahanah/60: 8, yang artinya: *”Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”* (Q.S. al-Mumtahanah/60: 8).

Dalam Kristen juga praktek moderasi sudah diperaktekkan sejak era Yesus, dengan perilaku beliau yang memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Sikap moderasi juga terjadi di kalangan Katholik, dengan pembaharuan pemikiran tentang konsep “Tidak ada keselamatan di luar gereja” (*Extra Ecclesiam Nulla Salus*) dengan pemahaman bahwa di luar gereja juga terdapat keselamatan. Dalam Hindu moderasi didasarkan pada konsep triwitakarana, harmonisasi kpd 3 tiga) hal, yaitu: (1) kepada sang Pencipta, (2) kepada manusia dengan konsep “Ayibsa”, yaitu tidak boleh menyakiti orang lain, dan (3) Menjaga lingkungan, misalnya 30 % pekaranan tidak boleh dibeton agar tetap ada resapan air. Moderasi beragama ini dilandaskan pada

---

<sup>89</sup> *Focus group discussion, 2 Agustus 2022 di Medan*

konsep “Wasudewa Kutumbakan”, yang berarti semua ciptaan Tuhan bersaudara.

Moderasi beragama juga ada dalam ajaran Budhis dengan konsep di dalam Saraniya Dhamma. Sang Buddha menjelaskan terdapat enam faktor yang membawa keharmonisan; (1) memancarkan cinta kasih dalam perbuatan; (2) dalam ucapan; (3) dalam pikiran; (4) memberi kesempatan kepada sesama untuk ikut menikmati apa yang diperoleh secara benar; (5) menjalankan kehidupan yang bermoral, tidak melukai perasaan orang lain; dan (6) tidak bertengkar karena perbedaan pandangan. Itu semua dilakukan baik di depan mau pun di belakang mereka. Ajaran menghargai perbedaan dalam Buddha juga dituliskan dalam kitab Tri Pitaka yang kemudian diturunkan oleh Raja Ashoka dalam prasasti Kalingga dengan maklumat “memuji agama dan keyakinan sendiri, tetapi mencela agama dan keyakinan orang lain, justru akan merugikan agama dan keyakinan sendiri. Sepatutnya kita saling menghormati agama dan keyakinan orang lain.”<sup>90</sup>

Begitu juga dengan agama Konghucu dengan konsep “Ji so pho i use Ijen” yang berarti “ yang tidak baik jangan diberikan pada orang lain”, “Se ili ili je in tae ta jen”, yang berarti kalau kamu sudah capai seperti ini , bagus baik, maka orang lain juga capai. “We tong tien” yang berarti hanya kebajikan Tuhan berkenan.<sup>91</sup> Sementara menurut penuturan dari Parisadaa Hindu Dharma Sumatera Utara bahwa bagi umat Hindu ada Darma pada agama dan darma pada negara,

---

<sup>90</sup> Focus Group Discussion, 2 Agustus 2022, Medan

<sup>91</sup> Ibid.

sehingga harus mengikuti aturan negara, termasuk terkait moderasi beragama.<sup>92</sup>

Namun dalam framingnya pemahaman diarahkan berbeda-beda oleh para tokoh agama atau tokoh politik berdasarkan kepentingannya dengan menggunakan otoritas agama. Seperti yang diungkapkan Dr. Irwansyah, MA bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan ketidakrukunan

1. Kita tidak menggelorakan mencintai tanah air dan rasa sebangsa. Afiliasi agama ditujukan pada pada bangsa lain. Misalnya Islam ke Arab, Budha ke Cina, Kristen ke Eropa, tidak kepada bangsa sendiri. Ini potensi konflik yg serius
2. Kita tidak toleran, antar penganut agama tidak toleran pada penganut agama lain atau pada inter agama sendiri
3. Kita suka mengembangkan ajaran radikal pada agama masing-masing
4. Penganut agama selalu berkonflik pada adat dan budaya lokal. Tidak adaptif pada adat dan budaya lokal.<sup>93</sup>

Pembentukan memori bersama lain tidak ditemukan dalam pola gerakan moderasi beragama di Sumatera Utara.

Sementara di provinsi Sulawesi Utara pembentukan pengalaman bersama ditelusuri dari konteks kesejarahan. Walau tidak semua masyarakat paham terkait kesejarahan dinamika masyarakat beragama di Sulawesi Utara tetap dipelihara oleh tokoh masyarakat dan tokoh budaya. Memory identitas etnisitas - agama juga dibentuk untuk memposisikan diri dari kelompok moderat dan

---

<sup>92</sup> FGD Medan, 2 Agustus 2022

<sup>93</sup> Ibid.

radikal. Pembentukan memory identitas etnisitas – agama pada satu sisi menjadi faktor positif dalam membentuk pengalaman bersama , namun pada sisi lain menjadi rentan dalam membentuk eksklusivitas kolektif yang mengarah pada konflik. Dalam pandangan Pierre Bourdieu masyarakat melakukan *distinction*, atau pembedaan. Ia menjelaskan, dalam masyarakat ada penghakiman-penghakiman menyangkut selera, ekonomi, dan seni. Proses *distinction* ini bergerak nyata, karena kebudayaan dalam masyarakat dibayangkan bersifat aristokrat, memiliki tingkatan. Bourdieu melihat masyarakat terpecah-belah dalam justifikasi selera yang tak sepenuhnya akurat, lantaran ada titik yang membuat masyarakat bisa bersatu, maka titik tersebut menjadi arena yang saling diperebutkan.

## **B. Perbandingan dan persamaan framing kesadaran**

### **Bersama**

Pembentukan kesadaran bersama dalam gerakan moderasi beragama di provinsi Sumatera Utara adalah dengan pembentukan kesadaran semua agama tidak mendukung kekerasan. Ada minimum tiga hal dalam mendorong kesadaran moderasi beragama di Sumatera Utara

Pertama, adat seperti konsep “dalihan natolu”, yaitu adanya ikatan sosial yang kuat antar tiga lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip marga. Kesamaan marga pada suatu etnis menjadi perekat walaupun mereka berbeda agama, karena sesama semarga harus dihindari adanya konflik. Kedua, Karakter masyarakat Sumatera Utara yang rasional sehingga mendasari segala tindakan pada pertimbangan kebaikan bagi sesama. Dan Ketiga, Sikap berbesar hati kalangan

minoritas yang cenderung “mengalah” demi kemashlahatan bersama sesama anak bangsa, seperti kerelaan penurunan patung Budha oleh umat Budhis di Tanjung Balai. Begitu juga kesediaan umat Islam membatalkan pembangunan masjid di Pahae di lokasi baru, karena mendapat penolakan masyarakat.

Sementara pembentukan kesadaran bersama dalam gerakan moderasi beragama di provinsi Sulawesi Utara adalah dengan objectivikasi dan internalisasi tagline-tagline berbasis akar budaya terkait moderasi beragama. Maka sebelum dilakukan objektivikasi dan internalisasi dilakukan proses eksternalisasi awal oleh aktor yang melakukan framing, dalam hal ini sering dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pimpinan daerah. Diantaranya adalah filosofi masyarakat Sulawesi Utara yang kemudian mengkristal menjadi adat istiadat dan budaya yang dikembangkan sejak Sam Ratulangi. Kearifan lokal dimaksud ialah jargon-jargon yang mempengaruhi cara pandang, sikap dan perilaku masyarakat Sulawesi Utaa, di antara ialah:

- a. Sitou Timou Tumou Tou (memanusiakan manusia) yang dicetuskan oleh Sam Ratulangi. Nilai filosofi dari ungkapan ini ialah pentingnya selain berbuat baik kepada orang lain, juga berupaya bagaimana ia menjadikan orang lain menjadi baik, tanpa memandang suku, ras, dan agamanya.
- b. Torang Kita Basodara. Dari jargon yang bearti “kita semua bersaudara” ini dibangun kesadaran bahwa semua masyarakat, apapun agama dan sukunya memiliki kesamaan (egalitarian), sehingga tidak perlu ada konflik.

- c. Torang Samua Ciptaan Tuhan. Dari jargon yang bearti “kita semua sama-sama ciptaan Tuhan” ini dibangun kesadaran bahwa persaudaraan itu diikat oleh karena kita semua ciptaan Tuhan. Ciptaan ini bersifat universal, tidak hanya manusia, melainkan juga alam semesta. Jika dengan ciptaan Tuhan selain manusia seperti tumbuh-tumbuhan harus dibangun kebersamaan, apalagi dengan manusia yang memiliki rasa dan akal pikiran. Menurut Sekretaris Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara terkait moderasi beragama sebenarnya sudah mereka tinggalkan karena disulut Torang semua bersaudara sudah lebih meningkat menjadi Torang Samua ciptaan Tuhan.<sup>94</sup> Akarnya dari Pak Sam ratulangi menggunakan Sitou Timou Tumou Tou (memanusiakan manusia), yang merupakan akar budaya. Seharusnya di Sulut tidak lagi berpikir hubungan antar manusia tetapi hubungan dengan alam. Akar budaya dan tagline itu kemudian diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Utara.
- d. Mapalus, yaitu kebiasaan gotong royong dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah tanpa memandang agama dan suku bangsa. Budaya ini diperaktekkan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, seperti membangun rumah, mengerjakan pertanian, pesta perkawinan dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini gotong royong dalam melancarkan kegiatan keagamaan walaupun agamanya berbeda. Sebab itu, jika umat Kristiani melaksanakan peringatan Natal, yang memberikan

---

<sup>94</sup> Wawancara Sekrearis Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, 23 Agustus 2022

pengamanan ialah umat Islam. Begitu sebaliknya, jika umat Islam melaksanakan shalat hari raya, yang mengawalinya ialah umat Kristiani.

Karena kharismatik tokoh juga di Sulawesi Utara partisipasi masyarakat dalam gerakan moderasi beragama tergantung pimpinan, karena masih mendengar orang tua terutama tokoh-tokoh agama.

Pendeta Lucky mengatakan “kalau saya lewat, bajingan-bajingan yang dijalan minggir. Minuman-minumannya disembunyikan lagi. Sama saya ke kampung Arab. Kalau saya ketemu dengan pimpinan masjid kita berpelukan”<sup>95</sup> Jargon atau tagline tersebut yang kemudian diobjectivikasi dan diinternalisasi oleh masyarakat Sulut, karena berasal dari akar budaya, yang kemudian akan memunculkan eksternalisasi baru di kalangan masyarakat Sulut

Situasi konstruksi sosial dari membangun kesadaran kolektif ini yang berbeda antara provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Nilai dan tatanan yang diobjectivikasi oleh masyarakat Sulut “diterima” oleh masyarakat sehingga ada kecenderungan masyarakat Sulut “meminahasa”. Sementara di Sumatera Utara Konsep seperti Dalian natolu tidak populer di kalangan masyarakat di luar Suku Batak di Sumut. Proses “Bataknisasi” tidak terjadi di Sumatera Utara.

### **C. Perbandingan analisa aktor gerakan moderasi beragama**

Aktor gerakan moderasi beragama di Sumatera Utara di pimpin oleh Kementrian agama termasuk di dalamnya adalah

---

<sup>95</sup> Wawancara pendeta Lucky, 22 Agustus 2022

FKUB, dan beberapa perguruan tinggi. Polarisasi top down sangat kental dalam hal ini. Kedua aktor utama ini yang kemudian membentuk operator-operator moderasi beragama apakah dari kalangan pegawai negeri sipil, mahasiswa ataupun siswa. Sehingga gerakan sosialnya sangat kental dengan Social Movement Organization, meminjam istilah yang diperkenalkan oleh Adam Snow.

Sementara di provinsi Sulawesi Utara, aktor selain Kemenag dan FKUB, aktor yang muncul secara kultural juga hidup seperti BKSAUA. Namun pada sisi lain ormas berbasis etnis religius juga bermunculan seperti MTS, Brigadi Manguni dan yang lain, yang pada satu sisi mendukung moderasi beragama namun pada sisi lain acapkali melakukan tindakan intoleransi.

#### **D. Perbandingan aksi bersama Gerakan moderasi beragama**

Provinsi Sumatera Utara dikembangkan berbagai program untuk mendukung program moderasi beragama. Namun umumnya juga bersifat top down. Jarang sekali program moderasi beragama muncul murni dari kehendak atau inisiasi masyarakat. Sehingga sulit kemudian moderasi beragama di Sumatera Utara dapat disebut sebagai satu gerakan sosial murni, cenderung mendekati level awal dari SMO. Diantara banyak program moderasi beragama di Sumatera Utara adalah

1. Kemenag RI mengembangkan desa sadar kerukunan, Syaratnya desa itu penduduknya dari berbagai agama. Kabupaten Serdang Bedagai sudah ada setiap kecamatan.

Sebentar lagi di Kabupaten Asahan. Moderasi beragama juga menjadi ketentuan nasional yang tidak bisa berubah. Kemenag kemudian melakukan penguatan di dalam di buat tingkatan-tingkatan pelopor, master. Dalam hal ini master-master moderasi beragama adalah dari para dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang bergabung dalam rumah moderasi beragama UIN SU Medan. Satu fasilitator atau disebut tingkat master ditujukan melatih wilayah Sumatera Barat, satu lagi melatih di lingkungan kemenag Sumatera Utara

2. Mengadakan aksi sosial yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan sesama anak bangsa. Kegiatan ini begitu intens, terutama pada masa pandemi covid-19. Semua agama mengadakan aksi sosial tersebut dalam bentuk pembagian sembako, pembagian masker, mengadakan gerakan vaksinasi massal bekerjasama antar majelis-majlis agama dengan beberapalembaga Pemerintah dan non Pemerintah. Lembaga Pemerintah, yaitu Pemprov sendiri, dinas Kesehatan, Pangdam I BB, Mapoldasu, dan lain-lain. Sedangkan lembaga non Pemerintah ialah beberapa lembaga sosial di dalam dan luar negeri.
3. Membentuk lembaga struktural dan non struktural yang bergerak dalam bidang pengembangan moderasi beragama, seperti pembentukan Pusat Moderasi Beragama di perguruan tinggi Islam negeri (IAIN, UIN), dan bidang moderasi di Kementerian Agama.

4. Mengadakan kegiatan sosialisasi pengembangan moderasi beragama di berbagai lapisan masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI dan majelis-majelis agama, seperti MUI SU yang melakukan berbagai kegiatan pengembangan moderasi beragama dengan nomenklatur kegiatan “Pengembangan Islam Wasathiyah”.
5. Memaksimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA), Forum Antar Pemuka Agama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU),.

Pada keseluruhannya semua gerakan di atas bersifat *top down*, yaitu dari Pemerintah, yaitu Kementerian Agama dan majelis-majelis agama, yaitu MUI-SU, PGI SU, Keuskupan Agung Medan, PHDI SU, WALUBI SU, dan Matakin SU, belum ada gerakan yang muncul dari kesadaran bersama. Namun dari kegiatan tersebut diharapkan akan muncul kesadaran bersama (*colective consiusness*) bahwa moderasi penting. Dari kesadaran bersama ini diharapkan akan lahir tindakan bersama (*colective action*), untuk kemudian tampilnya aktifitas-aktifitas bernuansa moderasi dari semua lapisan umat beragama.

Di Sulawesi Utara juga telah dilakukan aktifitas moderasi beragama oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti ceramah mengenai moderasi beragama di kalangan siswa SMU dan madrasah di sekolah dan madrasah. Kemudian di kalangan Kristen, gereja mengadakan kegiatan yang melibatkan semua sekte. Misalnya kegiatan harian, kegiatan semingguan, dan sebagainya.

Dalam mendorong pelaksanaan moderasi beragama Sulawesi Utara juga meminta FKUB menjadi UU tidak dalam level peraturan menteri, itu kami sampaikan di kongres FKUB. Menghadapi radikalisme pemahaman kontra radikalisme dimulai di internal FKUB

Pada sisi Kelembagaan, Pemerintah Sulawesi Utara membentuk lembaga saluran komunikasi antar umat beragama yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/walikota atau lembaga lain. Beberapa lembaga yang berkaitan dengan upaya menyebarkan moderasi dan kerukunan dapat diajukan, yaitu:

- a. BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama) yang dibentuk sejak tahun 2000 an. Pengurus badan yang diwakili oleh semua agama ini bertujuan sebagai saluran komunikasi antar tokoh agama dalam merespon sesuatu persoalan yang berdampak pada hilangnya harmoni sosial untuk me
- b. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Badan ini dibentuk sebagai penjabaran dari SKB Menteri Dalam Negeri Nomor 5, dan Menteri Agama Nomor 6. Tahun 2006 Sesuai tingkatannya, FKUB ditingkat provinsi di-SK-kan oleh gubernur pada tahun 2007, sedang FKUB ditingkat kabupaten di-SK-kan oleh Bupati atau walikota. Kepengurusan FKUB di tingkat provinsi sebanyak 21 orang, sedang di kabupaten kota sebanyak 17 orang. Para anggota diambil dari semua agama, minimal 1 orang mewakili satu agama, jika pemeluknya terdapat di tempat (kabupaten/ kota) tersebut. Keenam agama

tersebut ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Tugas FKUB provinsi dan kabupaten kota memiliki kesamaan, namun terdapat juga perbedaan, yaitu dalam hal pemberian rekomendasi pedirian rumah ibadah, yaitu oleh FKUB Kabupaten/Kota.

Kedua badan ini memiliki relasi yang komplementatif dalam upaya menjaga harmoni sosial. Jika BKSAUA dianggap sebagai kearifan lokal Sulawesi Utara, maka FKUB adalah kearifan nasional yang terdapat di seluruh Indonesia. Namun demikian terdapat perbedaan dari segi kepengurusan dan fungsi kedua lembaga ini. Kepengurusan FKUB hanya sampai kabupaten/kota, sedangkan FKSAUA sampai ke tingkat kecamatan. Sedangkan perbedaan fungsi ialah, jika FKUB berperan dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat, atau sebaliknya menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah. Sementara FKSAUA berperan dalam upaya mensosialisasikan kearifan lokal masyarakat yang fungsional bagi upaya melestarikan harmoni sosial.

Namun demikian, kedua lembaga ini difasilitasi Pemerintah secara setara, karena memang kepengurusannya pun berbeda. Seorang tokoh agama yang sudah menjadi pengurus FKUB tidak bisa lagi sebagai pengurus FKSAUA.

Menurut Pendeta Lucky tantangan dalam membangun kerukunan dan moderasi beragama adalah politik, orang-orang yang mencari panggung dan menggunakan agama.

“Orang punya duit, bikin kacaulah didaerah, kita tahu orang yang punya duit...ketika meledak kemudian pakkk..bicara seperti imam besar, baik Islam maupun Kristen, padahal tujuannya hehehehe tahulah kita. Sering terjadi pada hajatan politik”<sup>96</sup>.

Setiap gubernur, walikota punya tagline masing-masing. Hal itu politik yang demi untuk menyatukan umat. “ya untuk menanam investasi politik itu realitas. Tapiikan bukan politik untuk jahat”. Pada komunitas Kristen juga dilakukan internalisasi moderasi beragama melalui tagline, tentang pandangan pemahaman agama bahwa ada persamaan dalam humanism setiap agama.

Terkait tantangan gerakan moderasi beragama, Pak Beri menyebutkan gerakan untuk tokoh-tokoh agama ini kebanyakan di slogan-slogan. Seharusnya punya target dan program kerja. Sekurang-kurangnya depag di setiap kabupaten kota yang ada program menyentuh agama mayoritas dan minoritas. Aksi nyata itu tidak kelihatan. Seharus aksi nyata itu kelihatan tapi tidak kelihatan, misalnya membangun sentra ekonomi bersama, tapi itu belum ada”<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> Pendeta Lucky, Ketua FKUB SULut, wawancara 22 Agustus 2022

<sup>97</sup> Pak Berri, cendikiawan Katolik , wawancara 22 Agustus 2022

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Komposisi penduduk Sumatera Utara berdasarkan agama adalah pemeluk agama Islam sejumlah 10.064.383 jiwa, pemeluk agama Protestan 4.083.712, pemeluk agama Katolik 1.102.948 jiwa, pemeluk agama Hindu 16.076 jiwa, pemeluk agama Budha 389.243 jiwa dan pemeluk agama Konghucu 738 jiwa. Sementara komposisi penduduk Sulawesi Utara berdasarkan agama, pemeluk agama Islam berjumlah 857.997 jiwa, pemeluk agama protestan berjumlah 1.703.824 jiwa, pemeluk agama Katolik berjumlah 162.657 jiwa, pemeluk agama Hindu berjumlah 16.386, pemeluk agama Budha berjumlah 4.391 jiwa dan pemeluk Konghucu berjumlah 200 jiwa.
2. Konflik di Sumatera Utara dalam perspektif sebagai besar tokoh agama dan aparat pemerintah bukan konflik antar agama, namun konflik yang diprovokasi dengan sentiment agama. Akar konflik di Sumatera Utara diyakini sebagai konflik sumber daya dan penguasaan ruang public/politik. Sementara konflik di Sulawesi Utara sebagian besar berakar pada penguasaan entitas etnis-religius yang juga sebagian memiliki motif penguasaan sumber daya dan politik.

3. Gerakan Sosial moderasi beragama di Sumatera Utara dibentuk melalui pembentukan *memory theologis – wisdom etnis*, yang berbeda dengan pembentukan memori bersama di Sulawesi Utara yang dibentuk dengan dominasi akar budaya Minahasa. Perbedaan akar budaya di SUMUT dan SULUT bahwa *wisdom moderasi beragama* di Sulut yang berasal dari akar budaya diterima dan dipopulerkan oleh semua etnis di Sulut walau berbeda. Sementara hal yang sama tidak begitu berhasil di Sumatera Utara
4. Gerakan moderasi di Sumatera Utara lebih mengarah pada dasar dari SMO = Social Movement organization, Sementara di Sulut coba menjadi gerakan sosial murni walau masih memerlukan perjuangan yang lebih panjang

## B. Saran

1. Dalam penanganan konflik di Sumatera Utara penting lebih banyak dilakukan *assessment etnistas sosiologis* sehingga mendapat konteks penyelesaian konflik yang lebih tepat,
2. Sumut perlu mencari akar budaya dalam populerisasi moderasi beragama yang berakar dari budaya yang diterima oleh seluruh etnis-religius di Sumatera Utara
3. Sulawesi Utara penting menurunkan tagline yang berakar dari budaya dalam moderasi beragama dalam tataran aksi bersama yang lebih *real/nyata* dalam kemanfaatan kesejahteraan masyarakat, tidak saja dalam mapalus perkawinan atau pesta.

4. Sulawesi Utara penting mengelola ormas-ormas berbasis etnis-religius sehingga tidak menjadi sumber konflik
5. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam mengimplementasikan akar budaya dalam pengelolaan konflik dan moderasi beragama dalam bentuk tindakan nyata yang sistematis, dan metodologis sehingga dapat diukur dampak dan keberhasilannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq dan Rusli Karim, Ed., *Metodologi Penelitian Agama: Suatu Pengantar* (Jakarta, 1989).
- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial, Studi pengalaman Indonesia*, (Bandung, Penerbit Marja, 2013).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Politik 2017*, Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (Jakarta, 2017).
- Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014).
- Douglas McAdam dan David A.Snow, *Social Movements, Reading of Their Emergence, Mobilization and Dynamic*, (Los Angeles, Roxbury Publishing Company, 1997).
- Departemen Agama RI, *Perbandingan Agama*, jilid I & II (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982/1983).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, edisi kelima* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986-1997).
- George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta Kencana, 2007).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, UGM, 1998).
- Hasanudin, *Kerukunan Hidup Beragama Sebagai Pra Kondisi Pembangunan*, (Jakarta: Depag, 1981).

- Henk Schulte Nordholt dkk, *Politik Lokal Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Irfan, M. Syuhudi. *Penyuluh dan Pengelolaan Kerukunan di Kota Manado*. (Laporan Penelitian) (Makassar, Balai Litbang Agama Makassar, 2015)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung, Mandar Maju:1996).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB), *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Medan: LPKUB, 2002).
- Muyana, Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Rosyda Karya, 2001).
- Nicholas Albercrombie, (et,al), *Sociology of Dictionary*, (England,Penguin Perss, 1984).
- Samuel P. Huntington, *Benturan AntarPeradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, (Yogyakarta, Penerbit Qalam, 2000).
- Sudjangi, ed., *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia,seri 1* (Jakarta; Departemen Agama RI, 1996/1997).
- Simon Fisher and Friends, *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta, British Council, 2000).
- Smelser Neill , *Theory of Collective Behaviour*, (New York, Free Press of Glencoe, 1962).

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sumantri, Mulyanto, Ed., *Penelitian Agama: Masalah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Taher, Tarmizi, *Aspiring for The Middle Parth Religious Harmony in Indonesia* (Jakarta: CENSIS, 1987).
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kerukunan Umat Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

## Lampiran Photo



Photo Bersama sekretaris kesbangpol Sulawesi Utara dan kepala Kesbangpol Sumatera Utara



Photo setelah wawancara Ketua MUI Sumut



Photo FGD di Manado, Sulut; 22 Agustus 2022



Photo: FGD di Medan, Sumut, 2 Agustus 2022

## Pengantar Guideline Interview

Kepada Yth  
Bapak / Ibu /Saudara  
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.  
Salam hormat

Sebelumnya ijinkan kami memperkenalkan diri.

Nama : Prof. Dr. H. Hasan Bakti, M.Ag  
Unit Kerja : Pasja Sarjana UIN SU  
Status : Ketua Peneliti

Tim Peneliti:

1. Muhammad Jailani, MA
2. Ismahani M.Si

Berkaitan dengan penelitian berjudul KONflik dan Gerakan Moderasi Beragama di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, maka kami selaku peneliti memohon ijin Bapak/Ibu/saudara untuk berkenaan bersedia melakukan wawancara dengan para peneliti kami dilampirkan bersama surat ini. Bapak dan Ibu dapat menjawab pertanyaan peneliti sesuai dengan pemahaman Bapak/Ibu.

Untuk menjaga kerahasiaan Bapak/Ibu/Saudara selaku objek penelitian, maka hanya kami, enumerator/peneliti yang dapat melihat jawaban anda dari panduan pertanyaan. Nama Bapak dan Ibu tidak akan dicantumkan dalam hasil analisis penelitian dan laporan. Kami juga akan menyimpan data anda dengan baik bila laporan penelitian telah selesai dan didistribusikan. Bila data anda tersebar ke publik maka anda dapat melakukan komplain pada kami, telp. 081370212644, email: muhammad.jailani2011@gmail.com .

Demikianlah surat pengantar ini kami sampaikan, atas kesediaan dan perhatian yang Bapak/Ibu/Saudara berikan kami ucapkan terima kasih

Medan, 23 Juli 2021  
Hormat Kami,

Prof. Dr. H. Hasan Bakti, M.Ag  
Ketua Peneliti

## **Guideline Interview**

### **KONflik dan Gerakan Moderasi Beragama di Provinsi Sumut dan Sultra**

1. Nama :
2. Usia :
3. Lembaga :
4. Posisi/Jabatan :
5. Menurut Bapak/Ibu bagaimana hubungan antar umat beragama di provinsi anda?
6. Bagaimana anda memaknai konflik antar umat beragama?
7. Bagaimana situasi konflik antar umat beragama di provinsi anda?
8. Apa penyebab konflik tersebut?
9. Bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut?
10. Apa kesulitan dalam penanganan konflik antar umat beragama di provinsi Anda?
11. Siapa yg berperan dalam penyelesaian konflik tersebut
12. Bagaimana bapak/Ibu memaknai moderasi beragama?
13. Bagaimana pandangan bapak dan ibu terkait pemahaman masyarakat Sumatera Utara tentang moderasi beragama?
14. Apakah ada yang perlu diperbaiki terkait pandangan masyarakat tentang moderasi beragama? Pada bagian yang mana perlu perbaikan tersebut?

15. Bagaimana kemajuan gerakan moderasi beragama di provinsi anda?
16. Apakah ada kekhususan gerakan moderasi beragama di provinsi anda? Bagaimana kekhususan tersebut?
17. Menurut anda, apa yang dapat mempersatukan agar antar umat beragama dapat bersatu?
18. Pihak-pihak mana yang seharusnya menjaga toleransi antar umat beragama untuk dapat terus berjalan?